



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 15 (lima belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 11 April 2022
Waktu : Pukul 10.30 s.d. 14.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Ketua Rapat : Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI/
Acara : Tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
31 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 dari 11 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Riezky Aprilia, S.H., M.H
3. Ir. Mindo Sianipar
4. Ono Surono, S.T.
5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
2. Fraksi Partai Golongan Karya
5 dari 8 orang Anggota
1. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
2. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
3. Budhy Setiawan
4. Alien Mus
5. Teti Rohatingsih, S.Sos.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

4 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Ir. Dwita Ria Gunadi

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

6 dari 6 orang Anggota

1. Rusdi Masse Mappasesu/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. Julie Sutrisno
5. Yessy Melania, S.E.
6. Ir. Hj. Sri Kustina

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1 dari 6 orang Anggota

1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

6. Fraksi Partai Demokrat

5 dari 5 orang Anggota

1. DR. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. HJ. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
4. Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

1 dari 3 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.M.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

0 dari 2 orang Anggota

B. PEMERINTAH :

1. Menteri Pertanian (Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.);
2. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc.);

3. Inspektur Jenderal (Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.);
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
5. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.);
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.);
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si.);
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.);
10. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.);
11. Direktur Utama Perum BULOG (Budi Waseso) beserta jajaran;
12. Kuasa Direktur Utama/Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (Nugroho Christijanto); dan
13. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

(suara tidak terekam) penerima kuasa adalah Pak Nugroho, bahwa Direktur Utama PT Pupuk Indonesia tidak dapat menghadiri rapat kerja hari ini dikarenakan sedang melaksanakan ibadah umrah, itu saja.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat...

Berhubung pimpinannya *enggak* ada, cuma saya sendiri...

Yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog,
Yang terhormat Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia atau Holding Pangan ID Food, serta
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat kerja hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan jadwal acara Rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus tanggal 14 Februari 2022 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 16 Maret 2022 pada hari ini Senin tanggal 11 April 2022, Komisi IV mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka melanjutkan rapat kerja tanggal 22 Maret 2022 yang lalu.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.30 dan akan diakhiri pada pukul 13.00. Lebih cepat lebih baik, karena Raker ini hanya mengambil keputusan yang terjadinya ada perubahan. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Kayaknya yang paling *kenceng* Pak Johan *nih*, baru sampai dari NTB *nih*.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pada hari ini kita melangsungkan rapat kerja untuk melakukan pemantapan beberapa isu permasalahan yang sudah dielaborasi dalam rapat terdahulu dan meminta Menteri Pertanian meningkatkan kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional yang diikuti dengan upaya peningkatan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar ekspor maupun substitusi impor serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang tidak berjalan sesuai target. Terkait hal tersebut, Saudara Menteri beserta jajarannya diminta untuk melakukan restrukturisasi proporsional anggaran untuk program utama Kementerian Pertanian, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya pada rapat terdahulu, Komisi IV telah mendengarkan penjelasan terkait rencana program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2023. Oleh sebab itu, Komisi IV sekali lagi mengingatkan agar dalam menyusun program rencana dan anggaran harus fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung, ekosistem, serta mitigasi adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Beberapa hal yang dikritisi pada rapat sebelumnya antara lain beberapa data yang belum sinkron terutama data yang terkait dalam pencapaian produksi komoditas pokok. Komisi IV menilai hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan, khususnya bidang pertanian, yang dikhawatirkan target pembangunan pertanian tidak tercapai, pada akhirnya hal tersebut dapat merugikan petani. Untuk itu, sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan secara berkala. Pada kesempatan ini Komisi IV juga mengingatkan beberapa hal, diantaranya pemerintah agar menjamin ketersediaan pangan di semua daerah untuk mengantisipasi gejolak pangan, terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional.

Hal lainnya adalah mempertanyakan kembali kepemilikan kebun sawit perorangan, koperasi dan/atau perusahaan yang masuk kawasan hutan dan mendorong percepatan legalisasi kebun rakyat maksimal 5 hektar agar dalam mengakses program pengembangan sawit rakyat tidak kalah penting. Komisi IV juga mengingatkan kembali Saudara Menteri Pertanian untuk segera mengisi kekosongan pejabat Eselon I dan II dengan pejabat definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kerja pertanian. Beberapa waktu lalu waktu rapat dengar pendapat, sudah ada kesimpulan Komisi IV meminta mencabut pemain yang perihal masalah BPDPKS yang peremajaan sawit rakyat, karena ini adalah domainnya Kementerian Pertanian. Jadi tujuannya apa? supaya Dirjen Perkebunan cq. Kementerian Pertanian dapat membina langsung petani sawit rakyat. Jadi jangan hak-hak kita, kita kasihkan kepada orang lain. Saya banyak diprotes oleh beberapa pihak, pengamat, *kok* yang penting ini diberikan kepada orang lain, sedangkan yang BPDPKS belum tentu mengerti, yang nama dewan pengawas maupun dewan pengarah itu belum tentu mengerti permasalahan perkebunan secara detail dibandingkan dengan para pejabat di Kementerian Pertanian.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan terkait hal tersebut di atas. Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.*

Pimpinan, Ketua, dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,
Para pejabat Kementan dan Pejabat BUMN, Bapak/Ibu serta hadirin sekalian
yang kami muliakan,

Hamdan wa syukron lillah walaa haula walaa quwwata illa billah.

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini dapat hadir pada rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini untuk membahas tindak lanjut rapat kerja tanggal 22 Maret 2022 dan rapat dengar pendapat (RDP) pada 4 April 2022.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pertama, izinkan kami melaporkan kondisi ketersediaan pangan Januari-Desember 2022. Berdasarkan prognosa neraca 12 komoditas pangan pokok yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah dan lainnya ketersediaannya relatif aman. Untuk beras, jagung, bawang merah, cabe merah, daging ayam, telur ayam dan minyak goreng ketersediaannya diperkirakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, namun komoditas seperti kedelai, bawang putih, daging sapi dan gula konsumsi pemenuhannya selain produksi dalam negeri juga dari importasi. Prinsipnya sampai dengan Ramadan dan Idulfitri semua tersedia cukup aman menurut kami, kami sudah validasi data ini, kami sudah faktualisasi sampai lapangan, Bapak. Kementerian Pertanian juga melakukan antisipasi menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2022 untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan pokok tersebut dan sampai dengan akhir Mei 2022 ketersediaan dalam kondisi tercukupi, stok aman, bahkan stok akhir Mei 2022 untuk beras diperkirakan sebesar 9,84 juta ton dengan telah menghitung perkiraan panen raya. Begitu pula untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan komoditas lainnya.

Berbagai langkah antisipasi telah kami lakukan untuk mengamankan ketersediaan pangan pokok seperti kedelai, bawang merah, cabe dan lainnya yang rawan terhadap kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri melalui pendekatan-pendekatan jangka sangat pendek atau sangat darurat, Ramadan dan Idulfitri, ada agenda *temporary* maupun agenda permanen yang kami susun. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mempersiapkan langkah kerja

sama dengan *stakeholder* terkait untuk mendistribusikan pasokan komoditas pangan strategis dari daerah surplus ke daerah yang defisit.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Selain upaya menghadapi Ramadan dan Idulfitri, Kementerian Pertanian juga mengantisipasi masuknya musim kemarau 2022 dari hari besar keagamaan nasional atau HBKN pada akhir 2022. Agar produksi pangan tetap terjaga dengan baik, Kementerian Pertanian mengimplementasi program atau kegiatan melalui strategi cara bertindak, yang pertama GB I sampai V yang difokuskan pada yang pertama kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Dirjen Kesehatan Hewan dan Dirjen Perkebunan. Kegiatan utamanya Dirjen Tanaman Pangan seperti:

- a. Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, serta pangan lokal lainnya.
- b. Penguatan manajemen penyediaan benih.
- c. Pengamanan produksi melalui pengendalian OPT dan penanganan kekeringan atau banjir.
- d. Hilirisasi pengelolaan dan penanganan pascapanen untuk mengurangi kehilangan hasil.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH, dan Dirjen Perkebunan, sehingga produksi pangan utama tahun 2022 diharapkan bisa terjaga dengan baik.

Yang kedua, kegiatan pendukung untuk mendukung kegiatan utama kementerian untuk kebutuhan Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi 2022, meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan pertanian;
- b. Pengembangan diversifikasi pangan;
- c. Penguatan *research* dan inovasi teknologi pertanian;
- d. Peningkatan SDM pertanian;
- e. Peningkatan perkarantina;
- f. Penguatan manajemen pengawasan.

Dalam rangka memperkuat dukungan penganggaran pada pelaksanaan program kegiatan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 seperti diuraikan sebelumnya dan guna menindaklanjuti kesimpulan pada rapat kerja pada 22 Maret 2022 serta rapat dengar pendapat (RDP) pada 4 April 2022, Kementerian Pertanian juga mengusulkan kembali perubahan realokasi anggaran Ditjen PSP sebesar Rp297,48 miliar, realokasi eksternal sebesar 20 miliar dialihkan ke Dirjen Tanaman Pangan yang dipergunakan untuk penyediaan *combine harvester* sebanyak 48 unit, sedangkan 277,48 miliar digunakan untuk realokasi internal Dirjen PSP meliputi yang pertama Rp127,48 miliar dipergunakan untuk penguatan kegiatan jaringan irigasi tersier atau JIT, Jalan Usaha Tani atau JUT, dan Alsintan TR II, TR IV, pompa air, cultivator, dan *hand sprayer*. Kedua, 150 miliar dipergunakan untuk menambah alokasi Pupuk Organik Cair atau POC.

Realokasi eksternal juga dilakukan di BPPSDMP dan BPKP. Realokasi pada BPPSDMP sebesar 10 miliar dari kegiatan pembiayaan pertanian milenial dialihkan pada kegiatan UPPO di Dirjen PSP. Sedangkan realokasi dari BPKP adalah sebesar 124,47 miliar merupakan kegiatan P2L, Bimtek, dan TTI yang dialihkan ke Dirjen Hortikultura. Dengan memperhatikan usulan realokasi anggaran tersebut dan terdapatnya penambahan pagu surat berharga syariah negara atau SBSN lanjutan kegiatan tahun anggaran 2021 pada Dirjen PKH sebesar Rp448,5 juta dan penambahan pagu pinjaman dan/atau hibah luar negeri PHLN pada BPPSDMP sebesar Rp209,5 miliar dan PNPB sebesar Rp3,9 miliar, maka pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 semula Rp14,45 triliun menjadi Rp14,67 triliun. Sesuai perubahan tersebut, maka distribusi anggaran per Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal Rp1,060 triliun;
- b. Inspektorat Jenderal Rp97,68 miliar;
- c. Dirjen Tanaman Pangan Rp2,21 triliun;
- d. Dirjen Hortikultura Rp1,11 triliun;
- e. Dirjen Perkebunan Rp1,18 triliun;
- f. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1,61 triliun;
- g. Dirjen Prasarana Sarana Pertanian Rp2,99 triliun;
- h. Badan Litbang Pertanian Rp1,29 triliun;
- i. Badan BPSDM Pertanian Rp101,025 triliun;
- j. Badan Ketahanan Pangan Rp321,52 miliar;
- k. Badan Karantina Pertanian Rp1,01 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan rencana program prioritas tahun 2023. Kementerian Pertanian tetap fokus pada peningkatan produksi pangan, memperhatikan aspek *on farm* dan penguatan hulu sampai dengan hilir. Kementerian Pertanian akan melanjutkan program atau kegiatan prioritas, baik merupakan lanjutan kegiatan sebelumnya maupun kegiatan baru, untuk tetap memperkuat produksi pangan, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Landasan yang digunakan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023 adalah rencana kerja pemerintah atau RKP dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam rangka menjabarkan RKP tersebut, Kementerian Pertanian akan tetap fokus pada 5 program meliputi:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas,
2. Program nilai tambah dan daya saing industri,
3. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
4. Program pendidikan dan pelatihan koperasi, dan
5. Program dukungan manajemen.

Namun, sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sesuai program di Badan Ketahanan Pangan akan berintegrasi ke Badan Pangan Nasional. Sementara untuk kegiatan teknis seperti P2L, TTI, dan Bimtek tetap berada di Kementan.

Selain itu, sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN fungsi peneliti dan pengembangan Badan Litbang Pertanian berintegrasi ke BRIN. Oleh karena itu, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan disesuaikan. Sehubungan dengan kegiatan peningkatan produk pangan pada tahun 2023, target produksi beberapa komoditi pangan utama adalah sebagai berikut:

- a. Padi 56,08 juta ton;
- b. Jagung 23,21 juta ton;
- c. Kedelai 0,55 juta ton;
- d. Bawang merah 1,71 juta ton;
- e. Cabe 2,93 juta ton; serta
- f. Komoditi strategis lain seperti pada bahan Raker yang telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Pimpinan, Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja hari ini. Selanjutnya mohon perkenan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk kiranya dapat menyetujui perubahan realokasi yang telah kami sampaikan.

Mohon izin kepada Pimpinan Komisi IV DPR apabila diperlukan pada saatnya kepada masing-masing Eselon I dapat menyampaikan tambahan penjelasan atau dan atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan semoga apa yang ada diantara kami semua minta maaf kalau ada yang kurang dan salah serta khilaf selama berkomunikasi dan berinteraksi bersama Komisi IV DPR. Ridho Allah bersama kita. Sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Sebelum saya memulai kepada tanggapan Anggota, ini ada satu hal yang agak membingungkan ini. Ini ada di PKH ini, ada *on top* nilainya sampai setengah triliun, 448 miliar ini. Judulnya "SBSN Bull Center Indrapuri", ini nilainya hampir setengah triliun ini.

PESERTA RAPAT:

Izin, Bapak.

Itu juta, Bapak.

KETUA RAPAT:

448, *oh ya juta ya, sorry.*

Kami persilahkan kepada Anggota Komisi IV yang ingin menanggapi. Yang pertama, Mbak Ria Dwita.

F-P. GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shallom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya,*

Terima kasih kepada Pimpinan.

Izinkan saya mewakili Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut. Ada banyak poin ini, Pak, ada 11 poin, tapi nanti hanya ada beberapa yang ingin saya sampaikan, selebihnya akan diberikan secara tertulis.

Pak Menteri yang terhormat,

Kami meminta *food estate* yang sudah ditetapkan dan dikembangkan oleh pemerintah itu agar dievaluasi Kembali, Pak. Di tahun 2022 ini pemerintah akan memperluas lahan *food estate* di Humbahas target 1.000 hektar, padahal banyak petani mengatakan bahwa ketidakberhasilan proyek tersebut dari gagal panen hingga harga jual yang rendah dan mereka memilih menjual sendiri tanamannya ke pasar. *Nah*, mengapa ada klaim yang demikian, Pak? Kami minta Pemerintah membuat daftar inventarisasi persoalan di lahan *food estate* agar kita dapat mencari solusinya.

Yang kedua, ada peningkatan nilai tukar petani NTP Nasional pada Maret 2022 sebesar 109,29 yang ditopang oleh peningkatan NTP subsektor perkebunan. Namun yang menjadi perhatian adalah penurunan NTP pada sektor tanaman pangan. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan kesejahteraan petani tanaman pangan dan memastikan harga komoditas tanaman pangan di tingkat petani tidak turun. Selanjutnya, Pak, kami meminta Fraksi Gerindra mencermati adanya kebijakan pengenaan PPN pada komoditas hasil pertanian seperti tanaman pangan padi, jagung, kacang, umbi-umbian. Kami minta penjelasan pemerintah tentang hal ini.

Terkait dengan data yang dipaparkan Kementan pada rapat sebelumnya bahwa bahan pokok selama bulan Ramadhan sampai bulan Mei 2022 dilaporkan stok aman, namun di lapangan hampir semua mengalami kenaikan signifikan. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut? Apalagi harga daging akan menembus 170.000, Pak.

Selanjutnya, kami mohon kejelasan dari pihak Pak Menteri terkait distribusi pupuk bersubsidi, bagaimana validasinya. Kemudian, Pak, di sini ada angka pupuk organik cair untuk peningkatan IP tanaman padi sebesar 210 miliar ini, Pak, lokasinya di mana? Penggunaannya bagaimana? Apakah ini Dinas yang akan mengusulkan ke pusat? karena di sini kita juga harus mengetahui, Pak, pembagian-pembagian dan distribusi pupuk organik cair ini di wilayah-wilayah kita masing-masing.

Untuk transportasi roda 3, Direktorat Pupuk dan Pestisida perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Kami ingin minta adanya realokasi anggaran untuk pengadaan cultivator mengingat sangat dibutuhkan oleh petani hortikultura.

Yang terakhir, Pak, bantuan ternak kambing agar ditinjau Kembali, karena ada beberapa kelompok yang mengalami sakit dan banyak yang mati. Kami mengusulkan agar mekanisme pengadaanya berbasis wilayah terdekat, karena setiap kita ini punya wilayah sendiri yang juga punya peternak kambingnya, Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang demikian.

Yang terakhir, Pak Menteri, saya hanya ingin meminta konfirmasi kedatangan Pak Menteri kemarin ke Dapil saya, ada di Lampung Tengah juga, ada di Dapil Pak Ketua di Pringsewu. Karena itu kampung saya, Pak, Bulusari itu, Bumi Ratu Nuban, dari situ terlihat bahwa ada pupuk yang dibagikan dengan label partai tertentu *gitu loh*, Pak. Jadi kami ingin konfirmasinya apakah demikian. Karena tentu saja, Pak Menteri, *kan* sebagai simbol dari Kementerian Pertanian harus netral, Pak. Mungkin itu saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Hanan. Lampung semua, Ketua, Bu Ria, Pak Hanan. Silakan, Pak Hanan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Dari Bulog Pak Buwas dan jajarannya yang saya hormati,
Dari mana lagi itu Pak? Bulog juga? Bukan, Pupuk ya.

Pertama, Pak, terkait dengan operasional yang telah dikukuhkannya Pimpinan Badan Pangan Nasional, Pak, kemudian kaitan dengan angka-angka yang sudah disajikan, kemudian juga di dalam amanah untuk badan pangan itu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan memandatkan, Pak, Kepala Badan itu terkait dengan kaitan kebijakan impor. *Nah*, sedangkan kita lihat dari angka-angka yang disajikan, kita tidak bisa menghindari adanya impor-impor ke depannya. Untuk itu, saya minta tentunya ke depan 2023 dan seterusnya komunikasi data, Pak, komunikasi data terkait dengan produksi, kemudian jadwal panen, kemudian produktivitas, ini agar disajikan dengan terukur kepada Badan Pangan Nasional, karena tentunya ke depan kita tidak mengharapkan ada saling tuduh atau saling salah-menyalahkan terkait dengan kebijakan impor.

Kemudian yang kedua, saya berterima kasih bahwa informasi terkait dengan ketersediaan sampai bulan Mei aman. Namun tadi ada keluhan terkait masalah harga ya, ya saya kira kalau harga ini *supply demand*, yang penting bagi saya barangnya masih cukup, masih ada ditingkat lapangan, kalau masalah harga intervensi dari pemerintah dalam hal ini kebijakan dari Kementerian Perdagangan mungkin kalau masalah harga. Dari Kementerian pertanian sudah menyajikan cukup kalau masalah harga ya. Kalau kami, Pak, dari sisi petani tentunya kita mengharapkan harga yang baik untuk petani. Contohnya sekarang singkong misalnya, singkong sudah lumayan di atas 1.500 pada beberapa titik. *Nah*, yang khawatir kita ini gabah ini menjelang bulan puasa ini, sekarang sedang panen raya, jangan sampai gabah ini turun seperti tahun lalu di bawah angka 3.000 pada daerah-daerah tertentu.

Pak Menteri yang saya hormati,

Terkait dengan 2023 dengan target-target yang sudah disajikan tadi harapan kita adalah tentunya apa yang kita sudah capai selama ini bisa kita pertahankan, Pak. Ini sudah terpisah kaitan dengan impor, kita sudah sekian tahun tidak impor beras, jangan sampai impor lagi. Bapak punya target sudah dinaikkan ini dari tahun lalu untuk padi di 56,8, yang lalu mungkin 55. Artinya ini perlu kerja keras ya, perlu hal-hal yang dilakukan dengan kebijakan-kebijakan di 2023. Untuk 2023, tentunya saya mohon mendapat perhatian terkait dengan pertama potensi kehilangan hasil, Pak, akibat serangan hama maupun akibat panen yang terlambat dan seterusnya. Silakan nanti diterjemahkan untuk mengatasi ini seperti apa, kebijakan-kebijakan pengendalian hama terpadu yang selama ini diterapkan bagaimana di tingkat lapangannya yang kami melihat sepertinya sudah ditinggalkan ini, Pak, tidak diperhatikan lagi kebijakan pengendalian hama terpadu ini. Oleh karena itu, untuk 2023 ini harus dimulai lagi, Pak, untuk menghindari potensi kehilangan hasil ini. Penggunaan pestisida di lapangan juga sangat berlebihan, sudah di luar batas atau toleransi. Kita khawatirkan akan terjadi eksplosif ini, Pak, kalau ini diteruskan, tidak kita atur sedemikian rupa. Buku itu saya sudah jarang melihat buku ... (*suara tida jelas*), buku hijau itu, itu dulu setiap tahun diterbitkan, pestisida apa saja yang boleh dipakai, kemudian cara pengendalian

dan sebagainya ada di buku itu. Buku itu di lapangan sudah jarang kita jumpai di petugas-petugas kita. Saya kira yang sudah baik di zaman itu, Pak, zaman orde baru ya, kalau masih kita anggap baik masih bisa kita teruskan.

Kemudian juga perhatian terhadap..., tadi saya sudah sempat secara informal dengan Pak Menteri, sudah adanya kesulitan tenaga kerja di sektor pertanian ya. Kami menjumpai di beberapa kabupaten, terutama di Dapil kami, itu sudah terlihat sekali untuk tanam sering terlambat tanam karena buruh tanamnya tidak ada. Kemudian panen saat ini bisa dilihat, Pak, di tingkat lapangan, ada padi yang sudah hampir warna coklat, Pak, pada beberapa, banyak sekali yang sudah hampir coklat karena mereka menunggu mobilisasi alat panen dari tempat yang lain karena buruh panen dan buruh tanam ini sudah kurang, sudah sangat jarang dijumpai. Oleh karena itu, perhatian terhadap mekanisasi pertanian terutama untuk cultivator, Pak, itu saya kira masih relevan, sangat relevan di tingkat lapangan, begitu juga *combine harvester* dan sebagainya. Selain yang dibantu pemerintah, mungkin ada skema-skema lain supaya petani atau kelompok tani bisa dapat barang ini, Pak. Ini sangat dibutuhkan. Dan juga kesulitan BBM ini, Pak Menteri, banyak alat-alat kita, mesin-mesin kita yang sudah dibantu oleh pemerintah maupun milik pribadi tidak bisa dioperasikan atau dioperasikan sangat terbatas jam kerjanya karena kesulitan BBM. Kalau di perikanan ada pom, SPBU, SPBN-nya nelayan ya, kalau di pertanian mungkin perlu digagas itu, digagas adanya SPBP ya untuk pertanian, terutama solar ini, Pak, kebutuhan solar kalau di pertanian.

Berikutnya yang ketiga, untuk 2023 mohon perhatian terkait perbenihan. Penangkar-penangkar benih yang sudah ada, yang sudah sangat profesional, yang sudah dibina selama ini, itu diberdayakan, dimanfaatkan. Tapi komunikasi antar wilayah, antar lapang, antar penangkar benih, ini ada sekatnya, tidak ada komunikasi, jalan sendiri-sendiri, sehingga kebutuhan benih petani di suatu wilayah berbeda dengan apa yang ditangkarkan. *Nah*, terjadinya apa? Begitu panen tidak terserap 3 bulan berikutnya. Tidak terserap karena dia mau tanam misalnya Ciherang yang diproduksi oleh penangkar misalnya benih yang lain. *Nah*, ini sering terjadi, saya kira komunikasi ini. Kalau yang teknis perbenihannya sudah sangat luar biasa, atas binaan dari Kementerian Pertanian mereka sudah mampu menghasilkan benih yang sama seperti yang dihasilkan baik Perum Sang Hyang Seri maupun PT Pertani. Saya kira ini dari saya.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Hanan, saya bantu menjelaskan sedikit. Perihal tadi alat mesin pertanian, beberapa waktu yang lalu, rapat kerja, Saudara Menteri sudah menjelaskan ada kredit pakai KUR atau kredit leasing dengan uang muka 20-30%. Karena *combine* itu kalau berharap dari pemerintah uangnya nggak cukup, sangat tidak cukup. Jadi nanti kalau pulang ke Dapil anjurkan saja *udah leasing aja* tanpa bunga atau pakai KUR, biasanya DP-nya 20 sampai 30%.

Nanti tolong Menteri, Direktur KUR-nya suruh ikut, suruh bantu menjelaskan, kalau perlu sekarang kalau masih ada waktu dipanggil bantu menjelaskan kepada Anggota bagaimana cara mendapatkannya.

Yang kedua, Pak Hanan, seharusnya tidak perlu juga dibuat SPBU untuk khusus pertanian. Jadi seharusnya jemput bola, entah kepala desa, entah camat, membuat surat bahwa memang di tempatnya, di kampungnya dia itu ada alat yang membutuhkan solar dan lain-lain. Karena kalau tidak *kan* terjadi penyimpangan yang luar biasa untuk non subsidi ke pabrik-pabrik itu. Kemudian saya juga bantu menjelaskan, setahu saya di zaman Orba ini belum ada pestisida *loh*. Ada *enggak*, Pak Sekjen, pengadaan pestisida?

SEKJEN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Ada, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ada? Berapa besar? Coba jawab supaya Pak Hanan... *Hah?* Ada cuma 20 miliar, Pak Hanan, dibagi 480 sekian kabupaten/kota. Jadi rasanya...

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Yang saya maksud bukan itu, Pak. Di lapangan itu penggunaan pestisida yang swadana petani itu luar biasa. Pembinaannya ini, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, itu adalah Tupoksinya penyuluh pertanian. Jadi nanti ditingkatkan penyuluh pertaniannya sama yang tadi, Pak Hanan, perihal masalah benih. Benih itu kalau sembarangan dijual *kan enggak* boleh, harus ada sertifikasi. Jadi, Pak Hanan, setiap saat komunikasi sama BPTP di Lampung itu, petani atau kelompoknya langsung ketemu BPTP *aja* atau BPTP-nya diundang, Pak Hanan. Karena kita *kan* ada Bimtek *nih*, salah satunya adalah..., atau tanaman pangan. Jadi BPTP harus ke lapangan menjelaskan kepada itu cara membuat sertifikat laik edar atau laik apa. Kalau *enggak* laik itu pasti rebut, karena nanti yang pasti ada yang domplenglah yang abal-abal itu. Itu *aja*, Pak Hanan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Supaya jelas, Pak Pimpinan, yang saya maksud adalah jalur benih antar lapangnya. Ini tidak dibina atau dulu dibina sekarang kurang. *Nah*, sehingga kebutuhan benih misalnya di Kecamatan A..., biasanya antar kecamatannya ada jalur benih. Yang B memproduksi benih ini tidak sesuai kebutuhan. *Nah*, ini perlu dirakit lagi ya. Begitu juga antar provinsi, Pak, ini perlu diatur ini jalur benih. Kalau masalah sertifikat penangkar benih sudah sangat memahami ini, Pak, bagaimana supaya benihnya bersertifikat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, kita teruskan. Pak Ansi Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih, Bu Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Pak Menteri yang saya hormati,
Pak Sekjen, Eselon I, Pak Budi Waseso, Dirut ID Food, juga Dirut PT Pupuk Indonesia,

Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, saya akan menyampaikan beberapa hal, yang pertama terkait dengan angka-angka rencana impor dalam prognosa neraca komoditas pangan strategis Januari-Desember 2022. Tentu ekspor dan impor dalam perdagangan itu adalah hal yang biasa. Tetapi akan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, Pak, kapan Indonesia ini bisa bebas dari jerat ketergantungan impor yang setiap tahunnya impor itu bukan berkurang, tetapi terus meningkat dan itu kalau dibaca lebih lanjut, artinya kita akan semakin dari tahun ke tahun itu tergantung pada pasar pangan global dan tujuan kita untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan petani itu akan semakin samar. Saya kasih contoh, tadi dalam sejumlah komoditi strategis, baik bawang putih, kedelai, daging sapi, gula konsumsi, semuanya angkanya dari tahun ke tahun itu importasinya bukan turun, tetapi justru meningkat. *Nah*, saya ingin katakan bahwa gila kalau negara ini itu memastikan ketersediaan dan surplus pangan strategis itu dari importasi, karena ini adalah solusi jangka pendek dan tambal sulam. *Nah*, saya khawatir fakta ini terjadi, ketergantungan yang semakin tinggi terus menerus ini terjadi, ini karena adanya politik pembiaran, Pak, semacam ada ruang yang diberikan, sehingga kemudian perburuan rente dari kota impor itu terus menerus terjadi. *Nah*, saya perlu menyampaikan hal ini supaya ke depan ini diperhatikan betul. Saya ambil contoh, Pak Menteri, terkait dengan komoditi yang namanya kedelai, dari tahun ke tahun importasinya semakin besar, produksinya semakin menurun. Ya tentu ada beberapa faktor, satu misalnya menyusutnya lahan produksi kedelai, alih fungsi lahan, ini bagaimana mengatasi hal ini? Yang kedua, keuntungan usaha para pengusaha petani kedelai juga kecil jika dibandingkan dengan budidaya pada komoditas yang lain. Yang ketiga, kita tahu bahwa memang secara faktual kedelai juga susah tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Yang keempat, tentu dari segi kualitas dan kapasitas SDM petani kedelai ini masih sangat tradisional, tetapi kalau kita baca dari komitmen Kementerian Pertanian itu menyebutkan memprioritaskan peningkatan kedelai pada tahun 2022. Pertanyaan kami konkretnya bagaimana mengatasi 4 hal yang tadi menjadi persoalan utama dalam kedelai ini?

Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan harga pangan yang naik jelang hari raya. Bagi kami ini adalah suatu anomali atau suatu hal yang tidak lumrah.

Kalau kita lihat di banyak negara di dunia justru menjelang hari raya ini harga pangan, harga itu justru turun, bukan malah semakin meningkat. Betul harga-harga pangan yang baik, komoditas pertanian yang baik tentu menyenangkan para petani, tetapi juga kita perlu mencari titik keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat lainnya dalam hal ini sebagai konsumen. *Nah*, yang ingin kami tanyakan kami merasa aneh ya, Pak, hampir tiap tahun kenapa lonjakan harga ini terus naik. Apakah karena naiknya konsumsi dan permintaan masyarakat ini, sementara respon pasokan ini tidak bisa dipastikan segera ada di pasar ataukah ada penimbunan pangan secara sengaja di jaringan distribusi? Tentu motifnya kembali lagi profit yang besar. Atau apakah ada sumbatan distribusi akibat putusnya konektivitas antar daerah ini, Pak? *Nah*, ini perlu dicari jalan keluarnya, Pak, sehingga mungkin tahun-tahun berikutnya, hari ini dan tahun-tahun berikutnya masalah ini bisa segera diselesaikan.

Yang ketiga, saya mau melaporkan sekaligus apresiasi, Pak Menteri, terkait dengan pengaduan kami menyangkut hama belalang kembara di Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur. Di sana ada lahan *food estate*. Terima kasih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pak Wandu, dan juga lewat direkturinya ya Perlindungan Tanaman Pangan, Pak Takdir kalau tidak salah, itu sudah turun lapangan dan saya mengirimkan juga tenaga ahli saya untuk mendampingi di lapangan beberapa hari dilakukan secara baik. Tetapi mohon maaf, Pak, secara faktual di lapangan ini belum cukup efektif, Pak. *Nah*, upaya Kementerian Pertanian kami apresiasi tetapi belum efektif dan hari ini informasi terbaru itu sudah ada penambahan sekitar 3.000 hektar lagi yang dihajar sama belalang kembara ini. *Nah*, mungkin ini perlu, Pak, dicarikan solusi yang lebih jitu katakanlah seperti itu dan juga mungkin pelibatan masyarakat sekitar apakah bisa didorong dengan cara misalnya kalau mereka bisa mengumpulkan belalang ini kemudian diberikan apresiasi kepada mereka dengan mungkin 1 kilogram beras atau apalah. Mungkin ini bisa dicarikan solusinya, Pak.

Yang terakhir, terkait dengan saya mau *update aja* Dirjen PKH, Pak Menteri, soal sapi Sumba Ongole di periode pertama itu *kan* gagal, gagal dalam pengertian tendernya, Pak. Pemenang pertama itu dari Bandung, yang kedua dari NTB, dan yang ketiga dari Kupang, tiga-tiganya gagal. Lalu kami mencari jalan keluarnya, Pak. Kemarin saya lapor ke Pak Menteri, saya mempertemukan Bupati Sumba Timur dengan Pak Dirjen dan sudah dibicarakan, kami ingin mendapatkan informasi selanjutnya, Pak. Informasi dari Pak Dirjen, dari 500 sapi itu kabarnya tahap pertama 250. Bagi kami, Pak Dirjen tidak masalah, tetapi karena putusan rapat itu 500, mohon itu tetap konsisten, karena terus terang kita tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum. Saya kira hal ini yang perlu kami sampaikan mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih, kami kembalikan ke meja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima Kasih, Pak Ansi Lema.

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal, silahkan.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pak Ketua, Rekan-rekan Anggota Komisi IV.
Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Pak Sekjen, para Dirjen.
Yang saya hormati Direktur Utama Bulog, Direktur Utama Pupuk,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Saya mewakili Fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan beberapa hal. Sektor pertanian patut memperoleh perhatian serius, karena pemenuhan kebutuhan pangan nasional merupakan salah satu peran utama. Tentunya peran strategi Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui program yang terukur serta dukungan anggaran yang memadai, sehingga arah pembangunan pertanian dapat berjalan seperti yang diharapkan bersama. Pada rapat kerja hari ini, Fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dari prognosa neraca komoditas pangan strategis tahun 2022 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa komoditas neracanya mengalami defisit yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi, sehingga pemenuhan kebutuhan nasional 4 komoditas tersebut dilakukan melalui impor. Tentunya dibutuhkan upaya secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, salah satunya dengan mencari produksi dan memacu produksi dalam negeri. Berdasarkan target produksi komoditas utama tahun 2023 pada 4 komoditas tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan target produksi pada komoditas daging sapi dari 445,55 menjadi 465,15 ribu ton; kedelai dari 0,2 menjadi 0,55 juta ton; dan tebu dari 2,3 menjadi 37,15, sementara target produksi untuk komoditas bawang putih mengalami penurunan dari 91 menjadi 45,45 ribu ton. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi Kementerian Pertanian yang meningkatkan target produksi daging sapi, kedelai, tebu, namun dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai penurunan target produksi pada komoditas bawang putih.

Dua, dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional, termasuk Ramadan dan Idulfitri, selalu diikuti dengan tingginya kebutuhan pangan akibat peningkatan konsumsi masyarakat. Jika hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan yang mampu memenuhi permintaan, maka seringkali menimbulkan lonjakan harga. Kondisi tersebut terjadi bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan di mana beberapa komoditas seperti cabe, bawang merah mengalami kenaikan harga. Hari ini juga terkonfirmasi melalui data kondisi ketersediaan pangan strategis nasional, tiap provinsi pada periode kemarin tahun 2022 dimana komoditas cabe dan bawang merah pada beberapa wilayah mengalami defisit. Untuk itu, ke depan Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi komoditas yang sering mengalami lonjakan harga dengan memaksimalkan pengembangan lahan *food estate*, kampung hortikultura, maupun optimalisasi pemanfaatan lahan melalui program pekarangan pangan lestari. Kami berharap langkah

antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian membuat gejolak kenaikan harga dalam komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan nasional itu tidak lagi terulang lagi.

Ketiga, Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan terkait dengan harga gabah di tingkat petani. Dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa harga gabah kering panen pada bulan Maret sebesar 4.569,86 rupiah atau mengalami penurunan 5,76% terhadap harga bulan Februari. Tentu saja kondisi tersebut meresahkan bagi petani mengingat penurunan harga terjadi pada saat petani sedang memasuki masa panen. Hal tersebut sejalan dengan penurunan nilai tukar petani khususnya subsektor tanaman pangan dari 100,43 pada bulan Februari menjadi 99,23 pada bulan Maret dan nilai tukar usaha petani juga mengalami penurunan dari 100,17 menjadi 99,26 pada bulan Maret. Fraksi Partai Nasdem mendorong hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga semangat dan keberlanjutan usaha petani agar tidak meningkatkan, agar terus meningkatkan produksi. Terkait antisipasi musim kemarau yang berdasarkan data dari BMKG diperkirakan mulai pada bulan April di beberapa wilayah dan memasuki puncaknya pada bulan Agustus, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian melakukan langkah antisipasi menghadapi dampak buruk musim kemarau terhadap sektor pertanian karena menurunnya produksi akibat pasokan air yang minim dan irigasi yang kering.

Pak Ketua, Pak Menteri yang saya hormati,

Tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman soal kegiatan-kegiatan khususnya untuk persawahan, kami mengapresiasi kalau dari kementerian ada penambahan lahan baru. Namun, terkadang yang terjadi di daerah kita itu ada kurang lebih sekitar 5.000-an, lalu ditambah dengan lahan sawah baru, di sana tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena sistem irigasi itu tidak berfungsi secara maksimal mungkin. Kami harapkan dan kami kira soal irigasi tidak ada pada Kementerian Pertanian. Yang kami harapkan adalah kerja sama dengan Kementerian PUPR agar irigasi yang ada di sana bisa dapat ditanggulangi secara maksimal. Bulan kemarin...

KETUA RAPAT:

Bapak, cukup.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL):

Sedikit lagi, Pak.

KETUA RAPAT:

Karena ini kita hanya menyelesaikan yang lalu saja.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL):

Pak Menteri, beberapa bulan yang lalu mestinya Pak Menteri *kan* ke Maluku Tengah. Sebenarnya kami bersyukur kalau Pak Menteri ke sana, mungkin masalah koordinasi saja, karena kalau ke Maluku Tengah itu Pak Menteri harus mengatur benar-benar transportasinya. Ya nanti kalau sewaktu-waktu Pak Menteri mau ke sana kami kira harus ada koordinasi, sehingga kami bisa dapat memberikan informasi yang tepat.

Kami kira demikian, Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Abdullah Tuasikal.

Berikutnya Pak Haerudin, Fraksi PAN.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang terhormat,
Anggota Komisi IV yang terhormat,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,
Mitra-mitra, baik Bulog, ID Food, salam untuk semua, semoga sehat Ramadan
berkah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, ingin kami sampaikan bahwa situasi kondisi di bulan Ramadan ini kita semua sadar dan melihat semua harga mahal. Tidak ada satu komoditas apapun yang dibutuhkan rakyat, baik dari sembako terutama di pasar yang turun harganya, semua naik. Pada saat yang sama harganya mahal, susah barangnya. Ini memang perjuangan yang tidak sederhana, Pak Menteri. Kita sadar bahwa tidak tunggal kekuasaan ini, banyak macam ragamnya, banyak macam kepentingannya. Kalau keinginan pemerintah tidak menjadi satu kesatuan ya akan terus seperti ini, tidak akan pernah tertangani. Kita menyampaikan ini tentu dengan bahasa yang lebih halus, karena tidak untuk mencurigai siapapun, tapi memang beginilah kondisi negara kita ini. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ansi Lema bahwa di kita menghadapi kartel, orang tak percaya kartel di kita ada, tapi kita itu memang *saking* sudah tidak percaya itu menyerah apa adanya dan ini beban Pak Menteri tentu dan tidak bisa sendirian, butuh meyakinkan Bapak Presiden karena butuh kekuatan tentara, butuh kekuatan polisi, tidak tunggal kekuasaannya. Mudah-mudahan ini tertangani ke depan. Rakyat kita itu 70 tahun merdeka dan mungkin banyak orangnya belum bisa merasa nyaman kemerdekaan kita ini. Kedaulatan dan

kemandirian pangan yang kita gambar-gemborkan sampai hari ini memang baru slogan untuk kita semua.

Yang kedua, Pak Menteri, bagaimana kemitraan yang erat itu butuh didorong cepat, minimal kita itu dengan Bulog dalam proses pengamanan pangan kita ini, terutama beras bahan pokok kita, gula, kebutuhan-kebutuhan rakyat. Kita ingin melihat semua seiring, semua solid, semua bersama-sama, dan menjadi para pejuang melayani rakyat kita semuanya. Jadi barangkali untuk sementara transisi program dari awal kita yang terbaik bagi masyarakat kita selalu setuju. Dan kita ingatkan bahwa program yang kira-kira di luar area agenda-agenda strategis mohon berhati-hati, karena memang ini amanah rakyat dari anggaran itu, butuh kita juga berhati-hati semua dan butuh tepat pada sasarannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Makasih, Kang Haerudin.

Berikut dr. Slamet, Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan Komisi IV yang saya hormati beserta juga rekan-rekan, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,

Mudah-mudahan selalu sehat.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mensikapi tentang mahalny harga pangan sampai di pekan kedua ini, Pak Menteri, memang mengendalikan harga tidak ada di ranah Kementerian Pertanian, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa mahalny harga pangan hari ini tidak menyentuh langsung dan tidak dirasakan oleh para petani. Ini yang menjadi catatan kita, sehingga perlu dipikirkan bagaimana kemudian mahalny... Di sisi lain pemerintah mempunyai tugas menstabilkan pangan tidak terlalu mahal, tetapi di saat yang sama juga ada sebagian besar dari rakyat kita yang berprofesi menjadi petani yang juga harus diperhatikan masalah kesejahteraannya. Jadi mahalny harga pangan hari ini tidak menyentuh kepada langsung dirasakan oleh para petani kita. *Nah*, ini tentunya saya mengimbau kepada khususnya mitra kita kalau memang ada yang terkait ini harus menggunakan kewenangannya secara maksimal. Kenapa harga pangan

hari ini tidak terkendali sementara Kementerian teknis mengatakan bahwa stok cukup, *kan gitu*, Pak.

Kalau tadi disampaikan oleh Kak Ansi bahwa..., dan memang datanya begitu, nilai impor terus meningkat, itu secara tidak langsung sebenarnya *kan* memberikan label bahwa Kementan itu gagal dalam menyiapkan produk-produk pertanian terkait dengan pangan. Ya secara tersirat *kan* begitu, gagal, sehingga ini terus disampaikan cukup sementara harga pangan selalu tinggi. Kenapa? Karena menurut saya pemerintah tidak menggunakan kewenangannya yang memang harus sebagaimana mestinya. Jadi pemerintah tidak mengimbau, tapi lakukan yang harus dilakukan untuk kemudian melakukan penekanan pengawalan kepada pengusaha yang hari ini terus terang bahasa saya pengusaha Indonesia *tuh* rakus, tidak mau berempati kepada rakyat. Saya pikir tidak ada pengusaha yang rugi, tinggal kemudian dia mau *enggak* mengurangi keuntungan dia untuk berempati kepada rakyat kita, tinggal kuncinya ada di pemerintah, menggunakan kewenangannya untuk kemudian menekan itu. Tadi saya *ngobrol* dengan kawan sebelah saya, ada salah satu menteri yang mengimbau para pengusaha, pemerintah *kok* mengimbau, *kan* sesuatu yang tidak wajar itu, memegang kewenangan diberikan mandat untuk berkuasa mengatur kemudian hanya sekedar mengimbau. Oleh karena itu, pesan saya kepada Pak Menteri, dengan kewenangan yang ada optimalkan itu, tegakkan itu, untuk kemudian memberikan kesejahteraan-kesejahteraan kepada para petani kita khususnya.

Yang berikutnya, saya juga menyinggung terkait dengan PPN 11% yang akan menuju 12%, khususnya terkait dengan pupuk, Pak. Jadi kalau yang lain tadi sudah disinggung oleh teman kita dari Gerindra, terkait dengan PPN 11%, kalau itu jatuh kepada pupuk yang bersubsidi, saya ingin mendapatkan skema siapa yang menanggung dari PPN itu, apakah PI atau pemerintah. Tetapi yang lebih bermasalah lagi adalah pupuk non subsidi, ujungnya pasti diberikan atau dibebankan kepada petani kita. Di sisi lain ingin menggenjot produksi, di sisi lain kemudian petani kita berteriak untuk kemudian sekedar mendapatkan pupuk harus kemudian dibebani dengan PPN. *Nah*, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri sejauh mana upayanya kemudian untuk menyampaikan kepada kementerian terkait. Kalau usulan saya pupuk mungkin perlu kebijaksanaan khusus terkait dengan PPN, apalagi yang non subsidi. Ya ini karena menyangkut kepada petani kita.

Kemudian yang lain ini terkait dengan program, saya juga menguatkan saja, Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan bantuan-bantuan itu. Terus terang terkait dengan PKH, ini mohon maaf, Pak Dirjen, jadi bantuan kambing yang diterima oleh para peternak kita itu hampir sebagian bermasalah dan saya ada dokumennya. Ketika kemudian dilakukan bedah ketika mati, dinekropsi, itu di dalamnya rafia, Pak, dan memang perjalanannya sangat jauh. Saya bandingkan kemudian tahun kemarin saya ada program Kube, mungkin program usaha bersama dari BPSDM ya atau apa, itu kita serahkan ke petani usaha kambing luar biasa bibitnya. Oleh karena itu, mekanisme pengadaan..., bukan programnya yang dipermasalahkan, kita setuju program itu, tapi bagaimana kemudian pengadaan itu sehingga secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya dokumen kalau memang diperlukan,

sehingga saya tidak asal *ngomong* begitu ya bagaimana kondisi hewan-hewan bantuan yang diberikan kepada petani kita.

Itu, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Suhardi Duka, silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat.
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, dan para Dirjen Pupuk dan Bulog beserta semua yang hadir yang saya hormati,

Saya melihat bahwa prognosis neraca pangan strategis sampai dengan Mei dalam kondisi yang aman, tentu disediakan melalui penyajian dalam negeri dan juga impor. Impor kedelai 321.000 ton, kemudian impor gula 200.000 ton, ditambah dengan pengadaan dalam negeri, saya kira cukup sampai dengan bulan Mei. Kenaikan harga memang dipicu oleh 2 hal penting yaitu naiknya harga pupuk, kemudian naiknya BBM. Akibat naiknya BBM ini memicu kenaikan harga produk pertanian, sehingga dengan demikian sesungguhnya petani kita tidak banyak memetik kesejahteraan daripada peningkatan harga komoditas di pasar saat ini. Ada dua yang memang sampai saat ini sulit untuk kita swasembada yaitu daging sapi dengan kedelai. Saya berpendapat, Pak Menteri, kalau memang Pak Presiden ingin swasembada pada dua komoditas ini saya kira lebih bagus kita fokus pada area *food estate* itu, kita *bikin range*. Saya kira dengan ratusan ribu hektar di *food estate* itu ditambah lagi dengan Berdikari atau ID Food ikut serta menanam kedelai dengan peternakan sapi, saya kira bisa kita swasembada. Akan tetapi kalau memang RNI, kemudian ID Food, Berdikari hanya ingin panen terus, tidak mau menanam, ya *gimana* kita bisa swasembada. Kalau kita fokus pada dua komoditas ini untuk *food estate*, saya kira lebih mudah untuk kita evaluasi, lebih mudah untuk kita kembangkan ketimbang dengan lebih banyak tanaman yang kita masuk di situ.

Saya kira Komisi IV kemarin meminta supaya *head* pupuk non subsidi itu ada, tapi sudah ada jawaban dari PAIC bahwa bukan *head*, tapi dibuat harga khusus ya. Dengan demikian sekarang ini pupuk ada tiga harga, harga subsidi, kemudian harga khusus, kemudian harga pasar. Saya ingin tanya kepada Bapak harga khusus itu berapa, kemudian dikhususkan kepada siapa, dan datanya secara khusus diambil oleh siapa, sehingga kita tahu berapa pengaruhnya pupuk dengan harga khusus ini untuk peningkatan produksi. Saya juga mengoreksi sedikit Saudara PAIC bahwa keputusan Komisi IV itu ingin mendorong supaya membuka agen dan distributor di setiap daerah. Tapi saat ini saya merasa bahkan sangat sulit anda membuka distributor di setiap

daerah itu, kecuali mungkin cucunya ya, cucunya PAIC bisa membuat itu. Tapi kalau masyarakat umum, pengusaha umum, anda tutup. Ada satu pengusaha yang mengajukan kepada Bapak sudah 6 bulan tidak Bapak realisasi. Itu di Dapil saya. Tahun 2023 *Insha Allah* anggaran Kementerian Pertanian bisa naik dan saya kira juga Kementerian Keuangan sudah mulai sadar bahwa yang menopang selama ini di tengah pandemi adalah komoditas pertanian. Dan kita juga kawan-kawan di Komisi IV yang ada di Banggar saya kira sependapat untuk mendorong Anggaran Kementerian Pertanian. Saya meminta kepada Bapak supaya Indonesia jangan dilihat secara seragam, tetapi lebih memperhatikan karakteristik program itu sesuai dengan daerah dan tentunya Dapil supaya kita punya harga juga di wilayah kita masing-masing.

Aspirasi Anggota Komisi IV menjadi bagian dalam mendorong program tahun 2024, aspirasi yang disampaikan adalah aspirasi-aspirasi reses. Saya juga mendorong bahwa terbukti minyak goreng dari sawit tidak mampu kita kendalikan, karena memang ini lebih banyak dikuasai oleh konglomerasi dan kartel. Dengan demikian, untuk jangka panjang saya kira Dirjen Perkebunan doronglah kembali kepada kelapa rakyat, kelapa dalam. Kelapa dalam ini pasti dimiliki oleh rakyat dan ini bisa menopang untuk menyeimbangkan kepentingan dalam negeri dan kelapa dalam ini pernah berjaya di Indonesia dan saya kira sekarang juga harganya sudah mulai seimbang dengan produk sawit. Jadi kalau kita dorong ini ya..., bayangkan Jakarta memerlukan ribuan biji untuk tiap minggu masuk ke Jakarta ini yang namanya kelapa muda, kelapa ini, kelapa itu, dan ini sulit sekarang. Dari Sulawesi, Sulawesi Utara utamanya yang lebih banyak selama ini menjadi penghasil kelapa dalam. Selanjutnya saya juga mendorong supaya DAK untuk 2023 ini ditajamkan kepada peningkatan infrastruktur sektor pertanian, karena ini memang sangat penting. Bisa juga sebagaimana tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa memang pengadaan apa alat-alat pertanian dari Kementerian Pertanian memang tidak cukup, perlu didukung oleh pengadaan di tingkat daerah. Dan kalau DAK ini bisa digunakan juga untuk pengadaan katakanlah *combine* tadi itu, saya kira memungkinkan untuk bisa berjalan produksi secara merata di seluruh Indonesia. Saya akan mengalokasikan mungkin mendorong untuk 500 hektar bawang satu lokasi tahun 2023, Pak Dirjen Hortikultura, ini petaninya kita sudah siapkan, satu lokasi khusus untuk bawang merah. Saya tinggal minta dukungan dari Kementerian Pertanian minimal bibit.

Demikian, Ketua.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit toriq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Pak Budi, ada yang mau disampaikan?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Rekan-rekan Komisi IV,
Pak Menteri, jajaran Eselon I yang kami hormati,

Saya cuma ingin tadi menambahkan dari poin Pak Suhardi Duka. Tadi juga sempat disinggung sedikit oleh teman-teman, Pak Slamet, Kang Haerudin, terkait gejolak harga yang menghantui kita semua, bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara tetangga juga. Ini fenomena satu dunia dan saya ingin Pak Menteri dan jajarannya dan juga teman-teman mulai dari Bulog, dari Pupuk Indonesia benar-benar mengantisipasi karena saya khawatir tekanan harga yang sudah kita rasakan di Indonesia, di komoditas-komoditas pokok ini puncaknya bukan disini. Kemarin Komisi IV menjalankan kunjungan spesifik ke tiga lokasi dan kita sudah lihat lapangan tekanan harga yang dirasakan di pasar-pasar tradisional yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Selatan. Saya tekankan lagi, saya khawatir ini bukan berhenti di bulan suci Ramadan saja, tapi karena kondisi geopolitik ekonomi dunia juga kita harus mempersiapkan langkah-langkah yang tajam. Kenaikan harga bahan-bahan pokok yang juga di tengah kenaikan harga energi ditambah juga konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Rusia, ini menambahkan tekanan yang luar biasa. Kita masih sangat bergantung, komoditas-komoditas pangan kita beberapa strategis sangat bergantung kepada kebutuhan dari impor, termasuk juga tadi saya tambahkan lagi masalah gandum. Ini sesuatu yang juga bersama-sama kita harus hati-hati.

Bahan baku pupuk sudah banyak menekan kondisi di Pupuk Indonesia, ini saya khawatir kalau tidak kita antisipasi bersama, ini dampaknya akan lebih dalam lagi di bulan-bulan yang akan datang. Jadi saya minta, Bapak/Ibu sekalian, masukan dari teman-teman ini mulai dari level mikro sampai ke makronya, kita ingat kondisi keuangan negara yang juga butuh perhatian, utang kita sudah semakin bengkak dan kondisi fiskal kita meskipun masih terjaga tapi dengan berlangsungnya kondisi global ini yang serba tidak menentu, ini bisa berdampak begitu dahsyat kepada permasalahan pangan di Indonesia. Jangan sampai ini terjadi. Bapak Menteri Pertanian sebagai ujung tombak produksi komoditas-komoditas pokok kita, saya minta rapatkan barisan, semua program yang memang diharuskan untuk keberlangsungan kebutuhan bahan pokok jalankan sebaik-baiknya. Dan dari teman-teman Bulog, lakukanlah intervensi sesuai kewenangannya sebisa mungkin dengan memperhatikan antisipasi, kondisi pangan kita ke depan. Ini saya minta benar-benar menjadi perhatian ke depan. Sekali lagi, saya sangat khawatir kondisi dunia ini terus memberi tekanan terhadap harga kebutuhan pokok kita. Jangan sampai rakyat hari ini mulai menjerit tapi menjeritnya nanti menjadi sangat panjang. Sri Lanka, Pakistan, Peru sudah semakin..., gejolak politiknya sudah semakin-semakin mengkhawatirkan karena tekanan terhadap pangan dan energi. Kita sudah mulai merasakan di Indonesia. Saya minta Bapak-Bapak semua, Ibu juga, antisipasi dan lakukanlah kerja-kerja untuk menghadapi permasalahan ini.

Terima kasih, Pak Ketua, atas waktu dan tempatnya.

Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan *nih* PKH, Anda dapat protes dari Anggota Dewan *nih* di Dapilnya. Kalau anda *enggak* mampu nanti anda berhenti saja ya. Yang dibutuhkan itu bibit yang bagus, bukan abal-abal. Jangan yang Dapilnya Pak Slamet Sukabumi diambil kambingnya dari Medan. Saya ingatkan kembali *nih*, juga kepada Pupuk Indonesia, tolong ada keterbukaan bagaimana cara menjadi agen pupuk non subsidi. Saya minta nanti tolong sekarang disiapkan, nanti begitu selesai rapat kerja tolong dibagikan bagaimana untuk menjadi agen pupuk, persyaratannya 1 sampai 20 atau berapa.

Lanjut, Mbak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terkait dengan PKH waktu itu, Pak Menteri juga sudah menyampaikan ada *time limit* kalau *enggak* salah ya, dikasih waktu 50 hari kalau *enggak* salah. Nanti kita sejauh ini bagaimana perkembangannya. Karena kalau dari pembicaraan Pak Menteri itu mungkin sudah 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, apakah sudah ada *progress* atau tidak.

Kita masuk ke pendalaman. Ibu Alien, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV, Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Sekjen beserta Eselon I Kementerian Pertanian yang saya hormati dan *Insyah Allah*, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala,

Langsung saja, Pak Ketua, Bu Pimpinan, saya menganggap bahwa apa yang sudah kita rapatkan pada rapat kerja sebelumnya, kita juga RDP dengan Eselon I dan ini rapat kerja yang saya pikir sudah harus mengambil kesimpulan. Tapi saya izin penekanan, Pak Menteri, karena kedelai ini memang selalu menjadi masalah dan kita benar-benar harus memperhatikan bagaimana solusi ke depannya, sehingga kita bisa tahu sebenarnya kita dalam negeri ini bisa *enggak sih* mempersiapkan untuk komoditi kedelai ini sampai berapa banyak misalkan. Sesuai dengan anggaran per tahun saya melihat bahwa memang

setiap tahun penganggaran untuk kedelai ini ada tapi *targeting*-nya tidak tercapai sasaran. Oh ya, ada Pimpinan saya *nih* di samping *nih*, Bapak Rusdi Masse yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan bahwa pergantian..., saya ingin menyampaikan, Pak Menteri, ini yang ke sekian kali setiap Raker dan RDP saya selalu mengingatkan bahwa di tanaman pangan ini anggaran untuk kedelai ini selalu ada dan kita benar-benar sangat menyesalkan bahwa setiap tahunpun kita tidak mengetahui hasilnya dari proses penganggaran tersebut. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, kalau bisa kita ini draft *aja*, seperti bawang putih itu setiap kali mengimpor mereka wajib tanam. Kenapa tidak diwajibkan juga kepada kedelai ini? Perusahaan-perusahaan importir itu juga yang swasta melakukan wajib tanam misalkan. Kalau memang tidak seperti ini, seperti yang disampaikan tadi, apa standardisasi HET-nya harus kita tetapkan atautkah penyerapan ini kita satu pintu misalkan dari BUMN, dari Bulog, atau dari mana, ini harus dicari solusinya, sehingga petani kedelai ini juga punya satu pemikiran bahwa mereka tanam kedelai itu benar-benar ada yang beli dan benar-benar pasti terserap. Kalau *enggak* ya sudah, bibit yang dikasih, dibantukan, ya *alhamdulillah* kalau ditanam. Setahu kami petani kedelainya bilang, "Kami diberikan bibit, tapi masalahnya banyak yang *enggak* ditanam dan susah juga penanaman kedelai ini." Saya harap Raker ini memberikan satu solusilah, satu benar-benar yang menjadi pengikat bahwa kita itu benar-benar mau mempedulikan tentang kedelai yang selalu tiap tahun bermasalah. Pertama, Pak Menteri.

Kedua, dalam Raker kemarin juga dan RDP saya *udah* sampaikan bahwa optimalisasi lahan itu anggarannya hampir kurang lebih 804 miliar. Rekomendasi PEN itu 464 miliar, Pak Menteri. Anggaran yang berlebihan ini apakah sesuai apa tidak? Karena kalau seandainya yang direkomendasikan PEN itu hanya 400, di situ ada kelebihan sekitar 400-an. Kelebihan ini apakah tepat? Karena kita butuh penganggaran yang benar-benar tepat dan konkret dan bisa memberikan hasil juga.

Kemudian saya mau sampaikan, Pak Menteri, kalau seandainya minyak goreng ini juga dari ID Food, dari Bulog, saya heran, Pak, kita tahu persis harga bersubsidi itu tidak boleh dijual dari 14.000, yang terjadi di lapangan adalah kita membeli bisa lebih dari 14.000 lebih. Ini masalahnya ada di mana? Ini *controlling*-nya bagaimana? Kalau memang seperti ini saya berharap ke depan kita juga harus dorong Gernas ini, Pak Mindo. Ini harus kita lihat. Kemudian saya benar-benar mengharap bahwa Kementerian Pertanian memperhatikan juga bahwa kami di Indonesia Timur sangat membutuhkan pala, cengkeh, kelapa. Kami didorong *aja* itu dulu *deh* komoditinya, karena kalau yang lain mungkin belum terlalu *huge* buat mereka yang di sana. Tapi kalau untuk pala, cengkeh, kelapa mungkin kalau di Sulawesi Selatan ada coklat juga, kakao juga, itu harus kita dorong. Dari tahun 2021, saya minta Pak Menteri dan Kementerian Pertanian kita memberikan komoditi-komoditi andalan apa saja per provinsi, sehingga anggaran yang dikeluarkan Kementan ini tepat sasaran.

Untuk PKH, Pak Menteri, memang untuk bibit kambing, bibit sapi, kayak di daerah saya di Maluku Utara, kalau dikirim dari Bali, *alhamdulillah* masih hidup, kadang sampai di sana sapinya sudah setengah mati. Ini yang menjadi masalah, Pak. Pak Dirjen Nasrullah juga sudah menyampaikan ke saya

masalahnya seperti apa. Mungkin kita buat *aja* peternakan yang di dekat-dekat daerah timur *tuh* mana *aja*, atau kalau *enggak* di provinsi-provinsi yang benar-benar jauh dari Sulawesi Selatan atau Bali. Kita fokuskan di mana misalkan, antara Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, termasuk di situ ada Sulawesi Utara, tapi *kan* Sulawesi Utara lebih menyatu sama yang lain. Kita buat *aja* peternakan satu di situ, sehingga ini jaraknya juga ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa seperti itu? Karena memang saya setiap kali pembagian sapi, Pak Nasrullah tahu di 2020 tidak dapat. 2021 mudah-mudahan dapat. Kalau *enggak*, *enggak* dapat lagi ini. Karena memang transportasinya yang susah. Kambingnya dikirim dari mana? Ini yang menjadi masalah. Terus, di masalah karantina, saya berharap dan Pak Sekjen sudah mengetahui, kami sudah memiliki kesepakatan-kesepakatan kalau ini memang tidak menjadi kesepakatan akhir, saya minta kepada Pimpinan untuk tidak melanjutkan rapat. Kita skorsing dulu karena semua sudah tersepakati tapi ada yang tidak mengikuti kesepakatan tersebut.

Terima kasih untuk Pak Frans, Pak Dirut Bulog, saya terima kasih sekali untuk kerja samanya. Untuk di daerah-daerah timur terima kasih, saya tidak tahu lagi caranya berterima kasih karena bantuan dari Bulog sama ID Food sangat membantu kita di daerah timur. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Paling sama Pak Ketua RMS gantian, yang satu kuning, yang satu biru bajunya.

Selanjutnya Ibu Yessy.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Oke. Terima kasih, Ibu Ketua.

Ketua, Anggota, serta dari Pak Menteri beserta Eselon I dari Pertanian dan Direktur Pupuk Indonesia, ID Food, dan Perum Bulog yang kita banggakan.

Hari ini saya mau menyikapi beberapa hal. Yang pertama, tentu saya secara pribadi mengapresiasi kinerja dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang pertama, terkait peluncuran aplikasi pelaporan KUR. *Nah*, jadi saya pikir semangat transparansi dan digitalisasi pertanian di era sekarang memang sangat diperlukan dan harus kita kedepankan menghadapi industri 4.0. dan kami juga yakin dengan peluncuran aplikasi tersebut petani-petani kita bisa lebih mudah untuk mengakses, kemudian mengikuti secara prosedural administrasi dari persyaratan KUR. Karena kita tahu bahwa kalau mengharapakan anggaran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, tentu tidak akan cukup. Dana KUR ini yang sudah disiapkan oleh negara untuk membantu di sektor pertanian kita dan tentunya

secara pacu semangat, petani kita akan lebih merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa berhasil dari sektor pertanian yang dia geluti, yang dia pinjam, karena ini dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan bunga, kemudian juga mengembalikan pokok. *Nah*, ini salah satu semangat di sektor pertanian kita.

Kemudian saya juga berterima kasih kepada Dirjen Tanaman Pangan, Pak Wandu, yang sudah menjawab pertanyaan ketika RDP terkait apa *sih* yang akan Kementerian Pertanian lakukan terkait dengan pascabanjir di Kalimantan Barat. Saya sudah mendapat jawaban bahwa akan ada rencana untuk mengalokasikan sekitar 2.200-an hektar untuk program gen area budi daya tanaman sehat. *Nah*, ini saya berharap program ini bisa betul-betul berjalan dengan semangatnya untuk memperbaiki pascabencana besar banjir besar di Kalimantan Barat. Ini sangat dinanti oleh petani kita di sana, Bapak.

Kemudian catatan yang berikutnya terkait regenerasi petani milenial dan secara pribadi saya agak khawatir karena melihat data 2017 ke 2021 sekarang, jumlah petani muda kita menurun. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang pasti tugas kita bersama untuk memikirkan regenerasi petani, karena ke depan..., dan kita juga melihat bahwa di Kementan ada banyak program yang bersinggungan dengan petani-petani muda, salah satunya ada program..., bukan program, tapi apa ya, ada duta petani milenial didaulat oleh Kementerian Pertanian. Saya berharap Kementan bisa terus mendorong dan memberikan ruang kepada petani-petani muda yang sudah didaulat tersebut untuk punya satu gebrakan khusus di sektor pertanian, baik itu hulu-risahnya maupun hilirisasi. Karena jangan sampai mereka hanya nama dan apa ya, nama dan tamengnya saja sebagai duta petani milenial tetapi secara tanggung jawab, gebrakan untuk negara kita itu tidak ada.

Saya juga mau menanyakan kepada Pak Prof. Dedi dari BPSDMP, saya sudah tidak lagi melihat ada program wirausaha muda pertanian. Betul ya, Pak Dedi, tahun ini tidak ada? Boleh dijawab mungkin.

**DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
(Ir. DEDI JUNAEDI, M.Sc.):**

Mohon izin.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan, Pak Dedi.

**DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
(Ir. DEDI JUNAEDI, M.Sc.):**

Masih ada, Bu, tapi memang berkurang signifikan.

Terima kasih.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Masih ada tapi berkurang ya. Karena saya melihat di paparan bahan kita halaman 4 itu ada kegiatan utama dan pendukung Kementan dalam meningkatkan produktivitas pertanian kita di 2022, salah satunya dari aspek SDM pertanian itu ada akan menggenjot penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani muda KUB. Tapi kalau ini agak berkurang rasanya sangat disayangkan ketika kita punya cita-cita ingin menggenjot SDM pertanian milenial. *Nah*, mungkin ke depan bisa dikaji kembali, dan, Ketua, mungkin saya izin bertanya dulu sebelum memaparkan terkait BPDPKS dan Dirjen Perkebunan apakah jadi bahasan hari ini atau besok terkait PSR dan lain-lain? Karena kalau melihat di setiap kesimpulan Raker dan RDP itu selalu dicantumkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M):

Kan ada Perkebunan. Silakan kalau...

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Terima kasih, Ketua.

Jadi kemarin Pak Menteri beserta jajaran terutama Dirjen Perkebunan terkait BPDPKS dan Dirjen Perkebunan, kita memang menyikapi beberapa hal dan kita sudah RDPU dengan Asosiasi Penggerak Kelapa Sawit di masyarakat di Indonesia. Jadi rata-rata poin saat ini adalah mempertanyakan terkait Permentan Nomor 3 Tahun 2022 di mana Permentan tersebut *kan* mengatur tentang pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. *Nah*, di situ kalau mengacu pada RDPU, mereka semua tentu menyepakati bahwa Permentan tersebut tetap berjalan, dalam artian tidak perlu ada lagi rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan untuk program PSR. Tetapi yang jadi pertanyaan kita bersama adalah ketika tidak lagi memutuskan Rekomtek dari Dirjen Perkebunan, siapa yang akan mengawasi baik secara administrasi maupun verifikasi di lapangan? Apakah lahan yang diajukan oleh petani itu legal, lahan itu betul-betul ada, bukan lahan fiktif? karena mengingat selama ini yang menjadi tapak di daerah untuk multikontrol adalah Dirjen Perkebunan. *Nah*, jadi Permentan ini yang sekarang kita pikir perlu ada sikap bersama dari kita bagaimana upaya penyelamatan untuk sawit rakyat. Karena kalau melihat dari dana yang diperoleh dari penghimpunan BPDPKS ini sedikit sekali, hanya sekitar 4% untuk PSR dan untuk sarana prasarana pendukung perkebunan kelapa sawit itu hanya nol koma lima belas persen sekian. Takutnya kita ketika barang ini tidak lagi menjadi kewenangan Dirjen Perkebunan untuk mengawasi di daerah lewat Dinas Perkebunan terkait, akan semakin hilang kendalinya, akan semakin hilang fungsi kontrol dari program PSR ini, terutama untuk masyarakat kita.

Yang terakhir, terkait PKH, program PKH ini sebetulnya sangat baik semangatnya, tetapi perlu ada penilaian kembali mungkin dari pihak pengadaan, Pak Dirjen. Karena betul..., terutama sapi. Di daerah saya juga

begitu di Kalimantan Barat, sapinya rata-rata mati, jadi tidak ada yang bisa bertahan sampai akhir *gitu kan* dan yang kebanyakan yang sudah hamil, sapinya sudah *bunting*, itu juga mati. Jadi sayang sekali *gitu loh*. Sebetulnya sangat bisa berkembang, tapi dalam waktu beberapa saat setelah di Dapil kebanyakan itu sudah tidak bisa bertahan. Apakah ini karena pendampingan SDM dari petaninya yang kurang atau dinas yang kurang sosialisasi secara langsung di lapangan *gimana* caranya supaya sapi ini bisa hidup. Jadi bukan sosialisasi yang sifatnya hanya materi belaka di saat forum sosialisasinya, tapi lebih kepada sosialisasi langsung praktik di lapangannya, Pak Dirjen.

Mungkin itu saja, Ibu.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, tentang BPDPKS kemarin *kan* masuk dalam kesimpulan Raker kita, Pak Menteri, ya, bahwa Permentan yang Nomor 3/2022 itu kita pertanyakan dan bahkan Komisi IV minta untuk dicabut supaya ada kontrol. Selama ini BPDPKS sangat tidak ramah terhadap petani sawit rakyat dan bahkan ya semau-mau sendiri. *Nah*, itu menjadi catatan bagi kita sampai sejauh mana kita kehadiran negara untuk ikut mengatur untuk bisa tetap berpihak kepada petani rakyat.

Selanjutnya Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Terima kasih, Bu Ketua.

Pimpinan, Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri bersama Dirjen dan Bulog dan semuanya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri, dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pak Menteri ataupun yang disampaikan oleh Pak Dirjen selama pembahasan sejak Januari sampai sekarang, saya belum mendapatkan pembahasan isu yang terkait dengan persoalan narasi politik pangan Indonesia di pertemuan G20. Sepertinya kita tidak menemukan satu narasi di pertemuan G20 itu tentang apa yang harus kita sampaikan politik pangan bangsa Indonesia, lantaran saya memandang pertemuan G20 itu adalah suatu *event* yang sangat penting yang mendunia yang mengglobal. Kenapa kita penting di situ? Karena Indonesia adalah merupakan negara agraris dan kita di dalam Undang-Undang Pangan itu adalah menguatkan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Saya ingin supaya kementerian apakah itu nanti telah hadir, saya mendorong kementerian harus ada di situ. Saya mendukung menteri hadir di situ dan berbicara di forum G20 itu bahwa Indonesia itu adalah negara yang terdaulat dalam pangan. *Nah*,

ini sangat penting, itu adalah sebuah deklarasi yang bersifat mendunia dan kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah mandiri secara politik dan kita bisa melakukan negosiasi terhadap berbagai produk-produk pangan, di mana terutama produk pangan kita ini sangat dominan, katakan adalah kita penghasil produk sawit CPO terbesar di dunia, kita harus narasikan itu di situ supaya dunia tahu bahwa Indonesia itu adalah memiliki sebuah produk pangan yang unggul, berkualitas, dan jumlahnya besar. Tetapi kita tidak menentukan harga di situ. *Nah*, saya berharap narasi-narasi seperti ini di pertemuan G20 itu harus ada. Bila pun tidak Menteri yang berbicara disitu, saya minta Pak Menteri, Presiden menyuarakan ini. Karena penting buat kita supaya kita menjadi diperhitungkan oleh dunia bahwa Indonesia ini adalah penghasil produk pangan terbesar di dunia dan tidak dimainkan oleh para oligarch-oligarch dunia dan tidak dikendalikan oleh para pelaku-pelaku global dalam produk pangan. Yang seperti ini kita rasakan bahwa dengan segala sesuatu yang kenaikan harga sekarang ini, kita selalu mengatakan ini adalah karena kenaikan harga dunia. *Nah*, saya pikir ini sangat penting bagi kita untuk disuarakan Pak Menteri. Ini satu pesan saya ini untuk pertemuan G20 supaya Pak Menteri bisa menyampaikannya di pertemuan itu.

Kemudian ketika saya membaca prognosa ini, prognosa neraca komoditas pangan strategis Januari sampai Desember, maaf, Januari sampai dengan Mei. Saya di sini sebenarnya berbangga hati karena sampai bulan Mei kita memenuhi pangan kita melalui produk dalam negeri, ini kita bersyukur di sini. Tapi ketika kita membaca prognosa neraca komoditas pangan strategis Januari-Desember 2022, Januari sampai Desember, kita menemukan bahwa masih ada produk-produk pangan tertentu yang ada impor, sebutlah di sini adalah kedelai, kemudian bawang putih, kemudian daging sapi, kemudian gula konsumsi. Saya ingin karena ini adalah kita sebagai sebuah negara yang dengan Undang-Undang Pangan kita yang berdaulat dalam pangan ini, kita masih ada waktu bagaimana strategi kita untuk bisa mengurangi ketergantungan impor ini yang jumlah rencana impornya sudah tertuang di sini. *Nah*, bagaimana dengan waktu yang tersedia ini kita membuat strategi mengurangi rencana impor ini dan dengan maksud untuk kita memberdayakan pembelian produk dalam negeri kita, menyerap produk-produk pertanian kita, sehingga hasil daripada anggaran yang kita rencanakan ini betul-betul untuk kesejahteraan petani dalam negeri. Tentang kedelai yang sering kita hebohkan, baik harganya, kualitasnya, maupun jumlahnya, maupun iklimnya, ini juga sering diperbincangkan. Ada baiknya saya menyarankan di sini, di forum ini supaya Pak Menteri melakukan sebuah kajian komprehensif adventif. Jadi studi komparatif adventif sangat penting untuk mengatakan bahwa mana yang lebih misalnya *cost*-nya lebih tinggi atau lebih rendah atau harganya lebih ramah pasar dalam negeri atau seperti apa, sehingga kita kalau misalnya *cost* produksi untuk dalam negeri kedelai ini lebih tinggi daripada dan kita menghamburkan anggaran di situ, lebih baik kita melakukan rasionalisasi, sehingga dengan demikian kita bisa fokus pada produk-produk yang memang secara komparatif itu unggul ditanam di Indonesia. Bahwa kedelai kita ketahui ini *kan* iklimnya sangat khusus dan spesifik dan dia hanya bisa tanam dan panen sekali setahun dan dia tidak bisa dua kali. Coba kita melakukan semacam studi komparatif, sehingga biaya yang kita alokasikan dari APBN ini

bisa kita alihkan ke produk-produk yang lebih baik dan tingkat produktifnya lebih tinggi.

Kemudian saya memberikan apresiasi ya dalam pidato Pak Menteri ini terkait dengan soal dialihkannya kegiatan pemberdayaan petani milenial dialihkan kepada kegiatan hukum. Ini sangat apresiasi bagi saya. Karena apa? Karena ini juga adalah salah satu mengatasi kekurangan pupuk. Saya ingin supaya UPPO ini diperbanyak, karena para petani di sini sangat diuntungkan sekali. Ketika harga pupuk tinggi dan terjadi kelangkaan juga, maka solusinya adalah UPPO ini. Saya minta supaya ini juga memang harus dilakukan secara konsisten supaya kita tidak tergantung pada pupuk kimia yang sangat juga merugikan petani, juga merugikan humus daripada tanah. *Nah*, saya minta ini saya mendorong supaya kita intensif di sini.

Kemudian, Pak Menteri...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Masih berapa?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Masih ada lagi.

Anggaran-anggaran yang tadi yang sudah kita lakukan secara studi komparatif ada baiknya kita alihkan anggaran tersebut pada infrastruktur pertanian, irigasi, ini sangat penting. Misalnya kalau kita analisis terkait dengan soal *food estate* yang bila kita kaji selama ini ternyata tidak begitu sukses, maka ada baiknya anggaran ini kita alihkan saja kepada infrastruktur, kepada irigasi. Apakah itu sifatnya sekunder ataukah tersier, ini lebih penting ketika kita menghadapi perubahan iklim. Di Sumatera Barat sebagian besar itu adalah lahannya tadah hujan, ada baiknya kita memperbaiki infrastrukturnya. Kepada PSP pernah didiskusikan bagaimana memperbaiki irigasi di daerah Sungai Pisang, saya ingin supaya ini harus ada tindak lanjutnya, karena di situ ada ratusan hektar lahan kering lantaran memang tidak ada infrastruktur pertaniannya, padahal sumber airnya ada. *Nah*, saya minta ini untuk Sungai Pisang ini irigasinya perlu dibenahi, termasuk juga di daerah Tanah Datar, termasuk juga di daerah Damasraya. *Nah*, ini saya minta supaya infrastruktur irigasinya diperbaiki.

Kemudian terkait dengan soal... *Nah*, ini, Pak Menteri, tadi yang disinggung oleh Bu Ria tadi, ada pupuk yang merknya partai tertentu, saya ingin supaya ini didalami. Apabila ini adalah bersifat *privileged* untuk partai tertentu menyalurkan pupuk, *nah* ini saya minta supaya didalami, Pak, apakah ini benar atau tidak. Kalau *enggak* ada mohon nanti Pak Menteri beri penjelasan...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Masih lama, Pak Hermanto?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Supaya jangan ada pengaduan *privileged*. Bahwa kalau misalnya ini adalah kita berangkat dari prinsip keadilan, maka semestinya partai lain juga diberikan fasilitas.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pak Hermanto, Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

10 menit lebih, mungkin 15 menit. Biasanya Pak Darori *ngitung*. Berapa, Pak Darori? 16 lebih 2 detik.

Baik, selanjutnya Abang Johan. Tidak selama Pak Hermanto ya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bu Ketua, Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Pertama, saya laporan, Pak Menteri, harga gabah di kampung saya itu cuma 300, Pak, per kilo, 3.000. *Nah*, sementara HPP *kan* jauh di atas itu, Pak. Saya khawatir jangan-jangan cerita Pak Kepala Bulog, Pak Buwas sama Pak Dirjen TP itu terjadi di kampung saya, ada varietas yang tidak disukai harganya murah. Saya tanya varietasnya apa itu? Inpari, Pak. Artinya kualitas tapi harganya 300, Pak hari ini, 3.000. *Nah*, jadi, Pak, kejadian ini *kan* terus terjadi berulang tahun ketika terjadi panen raya. Apalagi kondisi saat ini kita sedang puasa. Petani kita ini, Pak, dia produsen sekaligus konsumen, dia sangat berharap dari hasil pertaniannya ini bisa untuk lebaran, bisa untuk sekolah anaknya, dan lain sebagainya. Parahnya lagi, Pak Menteri, sudah mulai berlaku *nih* 1 April PPN, termasuk padi kena 1,1%. Harga gabah sudah anjlok, ketika *nanam enggak* dapat pupuk, ketika panen dan berhasil dijual kena pajak lagi, kira-kira kurang dzalim apalagi kita ini pada petani kita. Padahal tugas kita sebagai pemerintah adalah melindungi petani kita. Saya bicara rakyat itu beri *stakeholder* kita, Komisi IV dan Kementerian Pertanian itu adalah para petani. Merekalah yang harus kita lindungi. Saya mohon maaf, Pak Menteri, akhirnya bertanya-tanya, Pak Menteri pernah diundang *enggak sih* di rapat kabinet atau rapat tentang penentuan harga? Apa *sih* yang Bapak pertahankan di situ? Karena apa? Kalau kita tidak berdaulat akan harga kita, percuma kita bicara tentang kaderisasi petani yang disinggung sama Mbak Yessy tadi itu. Mau program petani milenial, petani segala macam itu, kalau harga komoditas kita tidak punya berdaulat atas itu, *enggak* ada orang mau jadi petani, Pak. Berkurangnya jumlah petani kita bukan karena usia menurut saya, bukan

karena hal-hal yang lain, tetapi karena harga komoditas tidak bisa dikendalikan, terjadi inflasi dan terjadi kondisinya seperti hari ini. Artinya kalau kita ingin tetap orang bangga menjadi petani, Pak, Pak Menteri harus gagah berani bicara di depan rapat kabinet itu, bicara dengan Menteri Perdagangan bahwa harga ini kita berdaulat atas kita. Jadi itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, bicara tentang tema RKP 2023, Kementan dalam RKP temanya adalah mengenai peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi, itu temanya. Tapi kalau kita lihat dalam prognosanya atau faktanya hari ini produksi kita bukan meningkat. Saya ambil contoh misalnya dalam kode strategis, lagi-lagi PKH, daging saja, daging ini datanya beda-beda, Pak. Ketika kita Raker pertama, saya masih simpan fotonya itu, karena waktu itu saya menyoroti kedelai yang 0.2 juta itu, padahal itu 200 ribu *kan. Nah*, di situ tercatat target produksi daging kita cuma 444, tapi di prognosa ini angkanya 506. Mana yang benar kita jadikan data, Pak? *Nah*, itu kemarin Pak Menteri ketika kita RDP kemarin, jangan-jangan karena data kita tidak benar dan kita tidak valid, itulah Menteri Perdagangan mempermainkan kita soal harga ini. *Nah*, karenanya data tetap menjadi penting, Pak. Saya dukung tema ini tentang produktivitas, tetapi mohon faktanya juga kita meningkat produksi kita. Bagaimana kita bicara tentang peningkatan produktivitas sementara anggaran tanaman pangan berkurang dari tahun ke tahun, anggaran kedelai berkurang dari tahun ke tahun, anggaran jagung juga berkurang dari tahun ke tahun. Bagaimana kita bicara tentang produktivitas meningkat. Jadi antara tema dengan kenyataannya *nih enggak nyambung*. Jadi itu mungkin, Bu Ketua, saya hanya minta nanti soal harga, Pak Menteri, tolong sampaikanlah kepada kami kira-kira apa yang menjadi pemikiran terobosan Pak Menteri agar kejadian anjloknya harga kebutuhan pokok ini terutama gabah, beras, ini tidak terjadi lagi pada... Mungkin perlu dipaparkan lagi jangka menengahnya itu kayak apa, jangka panjangnya itu kayak apa.

Nah, terakhir soal daging. Kalau kita konsisten saja dengan produksi dalam negeri 44 juta ribu ton ini, sementara kebutuhan kita cuma 301 misalnya, kalau kita genjot produksi dalam negeri *enggak* perlu kita impor. *Nah*, karenanya dibutuhkan daya juang, sikap nasionalisme kita yang tinggi, berdaulat atas pangan, kita tidak perlu lagi mengandalkan impor. Pak Menteri, coba yakinkan menteri-menteri yang suka dagang itu ya, yakinkan Menteri Perdagangan, yakinkan Menteri BUMN dan lain sebagainya. Meningkatkan produksi dalam negeri soal daging, Pak, bukan dengan membeli lahan pertanian di Belgia, tapi bagaimana memanfaatkan kandang-kandang sapi di Sumbawa, di kampung saya di Sumbawa Ongol, di tempat-tempat sentra peternakan kita, bukan di Belgia, Pak. Pak Menteri harus yakinkan menteri-menteri yang lain bahwa kita *tuh* bisa dengan menjaga kedaulatan pangan kita itu dengan meningkatkan produksi dalam negeri kita.

Terima kasih, Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terakhir, Bu Nuraeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota Komisi IV,
Pak Menteri yang saya hormati,
Pak Sekjen beserta jajaran Eselon I Kementerian Pertanian,
Hadir di sini dari ID Food serta dari Bulog dan Pupuk Indonesia,

Yang pertama, menghargai atas capaian serta semangat yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan jajaran untuk terus melakukan semangat kerja dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pertanian di Indonesia. Walaupun tadi disampaikan plus minusnya ya, dengan anggaran yang terbatas tapi sektor pertanian terus berjalan memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi. *Nah*, ke depan tentu ini banyak yang harus dilakukan oleh Pak Menteri dan jajaran bagaimana membangun komitmen serta membuat suatu *grand design* atau *blueprint* untuk bisa mengatasi persoalan masih saja kita bergantung pada importasi terhadap komoditas pangan strategis nasional. Ini PR besar, Pak Menteri, untuk dibutuhkan semangat, niat baik, dan komitmen agar memiliki rasa kemandirian serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap produk-produk lokal sektor pertanian yang kita miliki. Di samping itu, Pak Menteri, dalam hal ini pembangunan pertanian ini perlu dilakukan intervensi dari segi anggaran, baik politik anggaran maupun prioritas perencanaan secara nasional serta intervensi kelembagaan yang kita tahu bahwa semangat yang dilakukan oleh Menteri Pertanian akan tetapi dari sisi kelembagaan yang lain seperti Menteri Perdagangan juga ini harus dilakukan secara intens agar semangat Menteri Pertanian juga bisa tercapai, tidak ada lagi importasi sektor pangan nasional kaitan dengan seperti daging sapi, gula konsumsi, serta kedelai.

Nah, yang saya ingin pertanyakan, Pak Menteri, ini belum dijelaskan ya, bagaimana perkembangan *automatic adjustment* yang kemarin sudah dirancang 5% untuk pencadangan penanganan covid. Kalau melihat yang disampaikan, paparan yang disampaikan hanya disebutkan Balitbang yang menyampaikan kaitan dengan *automatic adjustment* yaitu satu Satker dengan nilai delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh. Bagaimana dengan Dirjen-dirjen yang lain? Karena di rapat-rapat sebelumnya bahwa *automatic adjustment* akan dilakukan di semester pertama ya, awal tahun, dan apabila pada awal tahun ini tidak terjadi atau tidak dikeluarkan untuk cadangan penanganan covid, ini akan dikembalikan untuk anggaran berbasis kepada masyarakat. Ini mohon dijelaskan.

Berikutnya bahwa dari kami, Dapil, petani kita ini menginginkan bahwa seperti pengadaan benih, terus juga pupuk, ini juga ingin semangatnya benih-benih ini didrop ya dari benih local, termasuk bagaimana petani-petani di daerah juga, pengusaha-pengusaha di sektor pupuk juga untuk bisa masuk dalam hal yang selama ini perbenihan dan pupuk ini masih pada sistem *e-catalog*. Bagaimana ini untuk bisa membantu para petani dan pengusaha pupuk lokal agar bisa masuk dalam *e-catalog*. Berikutnya mohon kiranya juga dengan anggaran yang terbatas ini ada beberapa program yang harus dievaluasi seperti program *food estate* di mana program ini juga saya tidak melihat *output* yang jelas, bahkan cenderung gagal. Alangkah baiknya program *food estate* ini dialihkan kepada program-program yang lain yang memang bersentuhan dengan para petani kita. Untuk Dirjen PSP, ada anggaran 155 miliar ya untuk pupuk organik cair. Tadi yang disampaikan Bu Ria sama, ini bagaimana distribusi ataupun yang akan dilakukan penyerapannya, karena di Dirjen PSP sendiri juga ada anggaran untuk pendataan penerimaan pupuk bersubsidi melalui RDKK kurang lebih 10 juta orang. Ini luar biasa. Bagaimana ini untuk melakukan pendataan tersebut, sistem yang akan dibangun dan sebaran tiap-tiap wilayah seperti apa? Apakah ini pendataan penerimaan pupuk bersubsidi ini merupakan pupuk organik cairkah atau jenis pupuk yang lainnya?

Untuk Dirjen Horti, ini ada tambahan nilai ya kurang lebih 7 miliar di dalam program nilai tambah daya saing industri. Akan tetapi saya tidak melihat jenis program yang akan dilakukan seperti apa. 7 miliar ini untuk Dirjen Horti dari seratus enam puluh empat miliar tiga ratus menjadi 171 miliar, berarti *kan* dalam hal ini ada tambahan kurang lebih 7 miliaran. *Nah*, ini program yang dirancang jenis programnya seperti apa? Karena di dalam dokumen ini saya tidak melihat disebutkan beberapa program tambahan 7 miliar tersebut. Berikutnya untuk kegiatan program P2L yang awalnya ini dilaksanakan di Dirjen Badan Ketahanan Pangan untuk 2022 ini dialihkan ke Dirjen Horti. Ini pertanyaannya kenapa demikian itu? Apakah memang dari sisi Tupoksi peran Dirjen Horti ini juga ke arah peningkatan pangankah atau ini merupakan kewenangan di Dirjen Ketahanan Pangan? Mohon penjelasan.

Untuk Dirjen Perkebunan, saya mendukung sekali ke depan nanti ada program gerakan tanam kelapa ya untuk mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng saat ini. Alangkah baiknya mungkin sudah mulai sedikit demi sedikit mengarah kepada gerakan tanam kelapa. Karantina, ini ada kegiatan sertifikasi produk 1 juta, ini sertifikasinya apa saja? Apakah selama ini yang 1 juta itu sudah dikeluarkan produk-produk unggulankah, produk unggulan kitakah atau produk-produk yang sejenis apa? 1 juta itu *kan* luar biasa, jumlahnya banyak *banget* itu, serta adanya kerja sama 5 kesepakatan. Ini kerja sama dalam bentuk apa dan siapa saja yang melakukan kerja sama tersebut? Untuk PKH agar dibuat suatu program peternakan terpadu, ini bagus sekali untuk mengatasi saat ini kelangkaan pakan ternak, di samping itu juga mahalnnya pakan ternak, bahkan cenderung masih impor pakan ternak. Ini bagus untuk bisa dilakukan mengarah kepada program peternakan terpadu, jadi semua bisa diambil, tidak ada yang terbuang. Di samping itu juga mohon kiranya ini dievaluasi dari kualitas hewan ternak yang dikirim melalui program

kemarin dari PKH, ini karena banyak mengeluh ini para peternak di kita hewannya dari berat badan, bobot, dan sebagainya kurang.

Terakhir, bagaimana ini, Pak Menteri, kaitan dengan program untuk penanaman talas beneng. Ini saya tidak melihat, karena di Banten ini *kan* talas beneng merupakan produk unggulan. Apakah masih menjadi prioritaskah atau memang program talas beneng ini sudah tidak ada? Jangan sampai terjadi pembohongan informasilah kepada petani kita, sedang semangat-semangatnya ternyata berubah-ubah tanaman yang akan digulirkan dan lain sebagainya. Saya melihat ini hanya sebatas ada di program tanaman porang, tapi talas beneng tidak ada.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Mohon maaf, ternyata masih ada dua yang melakukan pendalaman. Pak Mindo, silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih, Bu Ketua.

Tidak banyak mungkin yang disampaikan. Saya hanya ingin berbagi pikiran soal indeks 400, pertanaman empat kali satu tahun itu. Saya pikir ini akan bermanfaat, karena biomasnya yang dihasilkannya pertahun akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya, hanya produktivitas perpanennya lebih rendah. Dalam hal ini mungkin Pak Dirjen harus berpikir keras, ada beberapa varietas yang tidak ketahuan sebenarnya siapa pemulianya. Bisakah nanti jadi tugasnya Kementerian Pertanian itu, nanti saya serahkan gabahnya. Pertanaman saya itu sudah 8 turunan tidak berubah. Asal muasalnya adalah kelainan dari satu jenis padi, kelainan ya yang lebih cepat berbuah, itu yang saya kumpulkan. Sekarang 8 kali itu oke, tidak berubah. Memang kemampuannya antara 6 sampai 7 ton, tapi 65 hari, paling lama 70 hari. *Nah*, kalau sekarang itu saya sebarluaskan *kan* tidak dijual, jadi *kan* terbatas sekali, hanya menyebarkan di antara kelompok tani bahwa hasilnya ini gabah ini masih bisa ditanam. Karena itu harganya saja lebih mahal 20% harga gabahnya supaya tidak melanggar peraturan perundangan, *kan* begitu, tidak boleh dijual sebagai benih, *kan* begitu ya. *Nah*, sekarang bagaimana kita bisa lebih legal jadi ada perusahaan benih nanti yang bisa mengambil alih itu walaupun belum dilepas. Tapi kalau sudah sampai 8 kali ini *kan* kitanya sebagai pemerintah yang tidak mendapat informasi apa yang ada di rakyat. Itu saya kira, itu yang pertama yang ingin saya tahu penyelesaiannya.

Yang kedua, sapi kita yang asli itu *kan* hanya sapi Bali. Sapi Bali itu sapi asli Indonesia. Ada teman Anggota DPR Dapil Bali mengatakan, "Bang, daging

sapi Bali itu jarang di hotel karena dianggap keras, alot.” Nah, ini dalam rangka menyambut G20 apa yang bisa dibuat oleh Pak Nasrullah supaya G20 itu kita manfaatkan mengatakan sapi Bali untuk dunia. Kelompok LSM yang saya pimpin senang kalau bisa bekerja sama dengan Pak Nasrullah atas izin menteri ya. *Insyah Allah* satu bulan sebelum G20 itu hotel-hotel sudah kita kasih coba, bagaimana bahwa daging sapi Bali itu bisa lembut seperti yang lain.

Yang terakhir, anggaran berikan tambahan ke desa 200 juta per desa, ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang pangan. Nah, saya meng-*appeal* kepada kementerian, kebetulan ada Bulog, ada ID State ya, jadi RNI itu, ID State Group itu jangan terlalu banyak berpikir bagaimana mengembangkan sapi berdikari yang di Sulawesi itu, jangan berpikir ke arah sana. Kalau Bulog, ID Estate itu komit menjadi *off taker*, dari desa, dari Bumdes, hitung saja 200 desa kali 75 ribu, ya 200 juta kali 75 ribu, anggap yang ikut program ini 35% saja, luar biasa itu ya. Itu lebih dahsyat dari berdikari, 30 kali berdikari desa-desa itu dan *logistic cost*-nya jadi mudah, murah, yang penting ID Estate, Bulog siap menjadi ya..., jadi KUR Bapakpun jalan, KUR dari kementerianpun akan jalan itu kalau bersedia menjadi *off taker*. Karena apa? Dengan mudahlah Bulog, dengan mudahlah ID Estate ini bisa kerja sama dengan rumah potong hewan yang besar-besar. Akhirnya mereka yang akan menstabilkan harga, mereka yang akan menstabilkan harga. Ada 3 poin itu yang saya minta dipikirkan bersama oleh kita.

Terima kasih, Ibu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M):

Baik, terima kasih.

Pak Dhevi Bijak, silakan.

F-PD (MOHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Mentan dan seluruh jajaran dari Kementerian Pertanian,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,

Karena berhubung saya ini paling terakhir, maka beberapa dari pertanyaan dan tanggapan saya substansinya sudah disampaikan oleh teman-teman. Maka dari itu ada beberapa saja yang mungkin tadi *kelupaan* teman-teman tanyakan.

Yang pertama, terkait tentu kami dari Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Kementerian Pertanian yang berjiwaku untuk terus

meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Yang kedua, melanjutkan amanah dari teman-teman penyuluh pertanian di daerah, Pak, di mana mereka meminta agar diperhatikannya masalah BOP atau biaya operasional penyuluh, karena sampai sekarang ini tidak ada kenaikan, masih di angka 400.000 perbulan, sedangkan mereka terbebani bukan hanya biaya operasional, tetapi biaya ATK, biaya demplot dan lain sebagainya masih mereka terbebani. Oleh karena itu, teman-teman penyuluh berharap penuh kepada Kementan untuk lebih memperhatikan penyuluh tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan anggaran program kampung bawang putih yang sebesar 27,55 miliar dengan luas lahan 1.700 hektar di mana saja lokasinya, kemudian apakah program kampung bawang putih ini menjadi memiliki keterkaitan dengan kewajiban wajib tanam bagi para importir. Selanjutnya, terkait seperti apa realisasi aturan wajib pangan 5% dari NIPH bagi para importir. Kemudian, kami dari Fraksi Demokrat juga meminta data importir yang sudah melaksanakan wajib tanam dan importir yang tidak tuntas menyelesaikan wajib tanam. Terakhir, kami hanya ingin mengingatkan kembali kepada Dirut Pupuk Indonesia terkait dengan ketersediaan pupuk subsidi hingga 8 April 2022 sebesar 469.272 ton atau sebesar 147% dari ketentuan stok Permendag. Namun demikian, kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta agar PT Pupuk Indonesia memberikan kepastian bahwa pupuk diperoleh oleh petani dengan mudah pada saat musim tanam nanti atau musim tanam berlangsung.

Mungkin itu saja, Pimpinan, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak/Ibu Anggota dan Pak Menteri,

Diakui atau tidak atau harus diakui bahwa sektor pertanian ini memberikan kontribusi yang positif selama ini, bahkan ketika pandemi kita. Kita harus mengapresiasi itu dan kita harus akui itu, tetapi memang yang sedang kita lakukan ini adalah proses memicu ini lebih baik lagi. Jadi yang sedang kita lakukan adalah memicu proses itu bagaimana mendapatkan kedaulatan pangan. Tadi beberapa teman-teman dari komisi memberikan penguatan untuk bertahan atau untuk menyampaikan segala yang sedang kita lakukan juga kepada presiden data yang lengkap juga supaya kita tidak diberdayakan kalau kita bicara tentang perdagangan, tentang harga, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga diperdayakan ya seperti beberapa waktu yang lalu saya juga..., kita juga bagaimana kita ini diperdaya oleh siapa dan oleh apa dengan berbagai macam harga yang sangat rendah, lalu kemudian petani yang masih kekurangan dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah proses kita bersama-sama, Pak Menteri, untuk memicu semua proses menuju kedaulatan pangan

supaya kita bisa lebih baik lagi supaya petani juga bisa mendapatkan hasil yang lebih ramah lagi, lebih layak bagi mereka.

Silakan, Pak Menteri, untuk memberikan jawaban.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

*Bismillahirrahmaniirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan segenap Anggota DPR Komisi IV yang saya hormati,
Bapak sekalian yang sama saya muliakan,

Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas tanggapan, saran, dan komentar, pertanyaan yang pertama Ibu Ria, kemudian yang kedua Pak Hanan, dan ketiga Pak Ansi Lema dari PDIP, kemudian Pak Abdullah, Pak Haerudin, terima kasih, Pak. Pak Slamet, Pak Suhardi Duka, Pak Budi, Bu Alien, terima kasih, Bu Yessy, Pak Hermanto, Pak Johan, Ibu Nuraeni, dan Pak Mindo, terakhir Dhevi. Terima kasih, kurang lebih 15 kami catat serius dan pulang ini akan kami coba dialogkan dengan semua jajaran untuk kita membangun semacam analisa, tesa, antitesa, sintesa seperti apa dari tanggapan yang ada dan masukan ini sangat-sangat saya akan jadikan referensi yang kuat untuk mencari jalan keluar seperti apa, Bapak.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Oleh karena itu, sebagian akan kami jawab tertulis, sebagian kami diminta untuk ada tim kecil yang mendekati Bapak-bapak untuk mendalami mungkin mencari seperti apa ya Pak Dirjen, Pak Sekjen, semuanya termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah berulang-ulang itu, kenapa *sih*...

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Kebetulan ini sudah jam 12.30. Sebelum Bapak Menteri menjawab semua pertanyaan, saya minta untuk kita *break* Ishoma dulu karena ini sudah waktu dzuhur, setelah itu nanti kita lanjutkan kembali, Pimpinan.

Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Terputus saya, terputus, sedikit lagi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Saya tawarkan di-*break* dulu.

INTERUPSI F-PD (Dr. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Menteri jawab dululah supaya...Pimpinan biar Pak Menteri jawab dulu baru kita Ishoma. Masih ada waktu, *iso-iso* Ishoma.

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Gini aja, Pimpinan. Kalau begitu tanya saja, per fraksi *aja* kalau memang begitu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya, siapa tau kalau mau Ramadan itu salatunya lebih awal begitu, Pak, Pak SDK, ya *kan?* Kita *kan...* *Gimana?* Di-*break* dulu, Pak Menteri?

INTERUPSI:

Bu Ketua, karena Pak Menteri sudah bicara saya pikir kasih kesempatan bicara dulu. Saya pikir jawabannya sudah taktis tadi itu, ada yang tertulis, ada yang dijawab.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Kita *break* sebentar saja? 15 menit salat atau bagaimana? Pakai *mic dong* satu-satu. *Gimana?*

INTERUPSI:

Pak Menteri tadi sudah jawab dan kayaknya pendek jawabannya, kalau nada-nadanya kayak gitu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Coba, Pak, pertanyaannya banyak masa jawabannya pendek.

INTERUPSI:

Kan tertulis, ada tim kecil. Sebenarnya sudah mau *assalamu'alaikum* tadi Pak Menteri. *Gitu*, Bu Ketua.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Pimpinan, *gini*, mau ditambah Ishoma atau apa nanti, tapi saya ingin memanfaatkan *moment* ini sedikit jawaban. Yang pertama, aku merasa di-*challenge*, Pak John dengan apa yang dijelaskan. Sebenarnya apa yang ada di kepala Bapak, di hati Bapak, sama dengan saya. Cuma saya tidak bisa kemukakan. Sesama bis kota *enggak* enak ini, ya kira-kira begitulah, Bapak. Bahwa saya *ngamuk* dalam Rakor 2-3 kali, Bapak, boleh tanya ini Pupuk. Jadi sama, Pak, *Insyallah* sama di pikiran kita. Kenapa mesti impor kalau memang kita bisa siapkan, *kan?* Cuma persoalannya *kan* mana uangnya ini? *Kan gitu*,

Bapak. Jadi kira-kira maafkan, Pak Ansi, saya paham dan inilah gunanya. Saya merasa *sih* Pak Slamet, Bapak sekalian, Pak Mindo, itu gunanya saya ada jadi Menteri, Bapak. *Insyah Allah, Insyallah lillahi ta'ala*. Ini Ramadan, cuma memang ini tidak semudah yang kita pikirkan, sama yang Bapak pikirkan *gitu loh*, dia butuh proses. Terlanjur kita impor daging 1,2 juta pertahun ekor, *enggak* bisa langsung *kunyuk-kunyuk* dalam 2 tahun, 3 tahun, kita bisa penuh itu, *enggak* bisa, dia berproses, butuh 30 triliun itu *doang*. *Nah*, itu, Bapak. Saya sudah 15 tahun kedelai diimpor. Kenapa diimpor? Karena zaman Pak Harto kita swasembada kedelai itu karena disubsidi sama dengan dua kali harga beras. Karena kalau satu hektar kedelai itu hasilnya cuma 1,5 ton, kalau harganya sama dengan 5.000 yang dibeli dari Brazil dan dibeli dari Amerika, *enggak* ada yang mau tanam, lebih baik tanam jagung 6 ton. Ini *kan* persoalan. Tetapi persoalannya adalah kita rakyat Indonesia makan tempe, makan tahu. Kalau terus-terus tergantung seperti ini tidak ada..., dan ini guna negara, Bapak. Saya *ngomong Lillahi ta'ala* seperti ini. ... (*suara tidak jelas*) gitu, Pak. Jadi *Insyah Allah*, Pak John, saya cuma memang merasa harus di-*challenge* seperti itu. Jadi seperti itu mungkin kalau masih mau *sourcing*. Saya siap sama-sama Komisi IV, Pak Dirjen. Saya *enggak* tahu jalan sendiri, saya *enggak* tahu itu kasih pupuk partai-partai, *enggak ngerti* aku, maafkan. Cek, di Lampung cek, akan saya *tinggalin* kalau ada yang...

INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP.,M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.

Pak Menteri, kami terima soal BPDPKS *gimana* keberanian dari Kementerian Pertanian? Karena terus terang, Pak, yang tadi Yessy omong itu benar sekali, beberapa kali. Bagaimana bisa dari 140 triliun dana PSR itu hanya 6 triliun buat petani rakyat. Itu menunjukkan bahwa kita *enggak* punya nyali di situ. Kalau orang NTT bilang belum apa-apa *udah* kalah bulu itu, *udah* kalah bulu itu, dan memang target dari PSR ini tidak pernah tercapai *kok* dari 180.000, hanya sekitar 27%, Pak. Mohon maaf *nih*, Pak, kita *ngomong*. Kalau dari soal *political will* kita semua sama, Pak, tetapi pejabat itu dinilai dari keberpihakannya dalam bentuk kebijakannya, Pak, bukan sekedar orasi, Pak. Mohon maaf, Pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Betul. Saya jawab, Pak Ansi. Seandainya itu pupuk juga uangnya di Kementan tidak seperti ini, kalau PSR itu uangnya ada di Kementan tidak seperti itu. Uangnya ini ada di mana, Bapak? Di bawah kita juga terbatas di situ dan itu dikoordinir oleh sekian banyak menteri melalui Menko. Bapak tahu SK terakhir itu 3 bulan dan nanti di istana baru saya iyakan, Bapak, perlawanan luar biasa dan harus saya cabut hari ini. *Whatever*.

INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP.,M.Si.):

Saya tambahkan sedikit, mohon maaf.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Artinya begini maksud saya, Pak Ansi, mohon pahami juga bahwa dalam rombongan ini bukan cuma Kementan, Bapak. Kedelai ya perlu, minyak goreng *kan* produktivitasnya oke, Pak Ansi, tapi soal tata kelola *kan* bukan dari saya. Melihat pangan itu ada dua orientasi, ketersediaan saya sudah lakukan, produksi kita CPO kita *kan* 6 juta lebih, yang selalu dipakai cuma lima juta sekian. MDO-nya 20%, cukup, Bapak. *Nah*, persoalannya *kan* kami tidak sendiri. Maaf, mohon di skorsing saja supaya Pak Ansi jangan bicara lagi, *kepancing* terus saya ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oke, saya skors ya 15 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.44 WIB)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(SKORS DICABUT PUKUL 13.47 WIB)

... (*suara tidak terekam*) respon dari semua tanggapan dan pertanyaan dari para Anggota, tidak semuanya secara detail tidak apa-apa, Pak Menteri. Jadi sebagian bisa tertulis, supaya juga banyak hal yang ada data dan lain sebagainya bisa dilihat secara bersama-sama.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang sama kami muliakan, hormati, Para Pejabat dari Kementan dan BUMN, Hadirin sekalian,

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Secara langsung kami menyampaikan bahwa semua pertanyaan akan kami himpun bersama di Kementan dan untuk memberikan jawaban secara umum nanti oleh Pak Sekjen terhadap apa-apa yang ada. Tetapi kalau masih ada yang harus dikembangkan, Eselon I kami tentu siap memberi tambahan kalau dibutuhkan. Yang pertama ingin kami sampaikan tentang *food estate*. *Food estate* itu ada di Kalimantan Tengah, itu ada di daerah rawa, dan *food estate* itu kurang lebih yang kita tangani di sana 30 ribu hektar. 30 ribu hektar itu cukup luas *loh*, Pak, karena DPR ini kurang lebih 50 hektar *aja*. Dari 30 ribu hektar dan kami nyatakan bahwa untuk program pertama *food estate* di Kalimantan Tengah di rawa yang ada itu keberhasilannya cukup, walaupun di dalamnya ada lahan *existing* dan ada lahan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dari 3.000 itu ada yang gagal kurang lebih tidak sampai 200 hektar, dan yang gagal 200 hektar itu kurang lebih sampai 300 hektar, dan ini biasa, Bapak Mindo, kalau dalam 30 ribu ada yang gagal sampai 1.000 pun masih tetap

wajar, dan ini mungkin suatu saat perlu kita lihat secara sama-sama di tempat itu.

Kemudian dalam konsep yang ada itu total *food estate* di Kalimantan Tengah hanya 60 ribu hektar, itu rencana pemerintah sampai 2024. Bukan yang 1 juta lahan gambut, bukan. Bukan yang 100 atau 300 ribu hektar lahan lain yang ditransmigrasikan, bukan. Yang ada adalah 60 ribu hektar, dan kita baru masuk 30 ribu, tahun ini kita masuk baru 22 ribu kurang lebih ya dan dari 22 ribu itu yang layak adalah 16 ribu hektar. Itu yang pertama untuk di sana dan kami merasa bahwa tidak gagal, karena produktivitasnya yang biasanya di sana dilaporkan paling tinggi 2,6, 2,8 sampai 3,2, sekarang di atas 4 ton perhektar. Itu berkaitan *food estate* di Kalimantan Tengah. *Food estate* di Humbahas sekarang ini 215 hektar, yang dijanjikan 1.000 hektar. Ketidakberjalannya dengan maksimal di sana adalah karena lahan yang tersedia terjadi tarik-menarik dari tanah adat dan penduduk setempat, jadi bukan karena kita. Tetapi 215 itu berhasil secara total, ditanam di sana adalah bawang putih, bawang merah, dan kentang, dan termasuk dengan *off taker*-nya dan lain-lain *enggak* ada yang seperti yang disampaikan mundur dari tempat, *enggak* ada, Bapak. Semua jalan, bahkan kelompoknya itu sudah punya simpanan yang miliar dari apa yang ada. Kemudian karena di sana lahannya tidak, belum maksimal maka *food estate* daripada perencanaan ini kita harus menunggu klarifikasi dari lahan yang kurang lebih 700 hektar itu, dan ini lahan baru, Bapak. Lahan *totally* baru, maka kita tarik program *food estate* dalam bentuk korporasi *food estate* di Wonosobo dan Temanggung, direncanakan seperti biasa di Temanggung dan Wonosobo per 300 hektar lebih itu mendapatkan 48 miliar dan setelah panen kemarin menghadap ke 82M hasilnya, jadi bisa dapat dua kali lipat setelah dikorporasi, diatur pertanamannya, diberi pelatihan administrasinya, di input KUR-nya di sana, dan lain-lain sebagainya.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Yang ketiga adalah *food estate* di NTT, di Sumba Tengah. Dari Sumba Tengah itu adalah 5.000, 3.000 adalah padi, dan 2.000 adalah jagung. *Totally* ini berhasil, walaupun beberapa katakanlah ada 400 sampai 500 hektar yang jagungnya kecil karena untuk pertama kali dia tanam dan di situ masalah air masih utama. Kita lakukan adalah mengejar dua kali tanam pada musim rendengan. Jadi musim rendengannya dipercepat penanaman diatur hanya 14 hari lahan kosong dan diintervensi kemudian dan itu jalan. Oleh karena itu, di 3 tempat ini baru 3 tempat ini menjadi *food estate* ya secara keseluruhan, dan hasilnya kami 100% mengatakan adalah berhasil dengan baik. Sekarang kita *udah* coba lagi di Belu, Belu itu adalah tempat yang selama ini belum bisa karena lebih banyak batunya kata orang sana. Bahasa orang NTT, lebih banyak batunya dari tanahnya, dan *alhamdulillah udah* dua kali pertanaman dan hasil pertama hanya 153 untuk 50 hektar, terakhir ini *udah* dapat 400 juta lebih dalam 53 hektar itu. Oleh karena itu, rakyat di sana sudah mulai mendapatkan pendapatan dan Bapak Presiden memintakan untuk dikembangkan menjadi di atas 10.000 hektar. Kita akan tetap main di NTT. Yang belum kita lakukan adalah di Maluku dan Papua. Kita berharap segera akan masuk di tempat itu.

Bapak, hadirin sekalian yang kami hormati...

INTERUPSI F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Izin, Bu Ketua, masalah *food estate*. Ya, sebentar.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya, silakan Bang Johan

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bagaimana dengan temuan BPK, Pak? Ada dana bermasalah dua program di Kementan salah satunya *food estate*.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Jadi *food estate* yang di dipersoalkan BPK adalah yang di Kalimantan Tengah, ini berkait dengan pengairan yang dibuat PUPR dan lahan yang kita lakukan sendiri. Ada kesepakatan kita masuk kurang lebih 8.000 ya, 800. 8.000 hektar di mana pertanamannya sudah jalan, sementara PUPR mau di tempat yang baru yang masih ada berbagai hal dan kami sudah klarifikasi dan sekarang *udah clear*, BPK sudah terima. Untuk itu dimasukkan sepanjang kita lakukan penanaman lain kembali kepada lahan yang baru yang sudah masuk ke dalam perencanaan. Jadi seluruh irigasi dalam *food estate* itu ditangani oleh PUPR, Bapak. Jadi besar anggaran disana lebih banyak anggaran infrastruktur yang ditangani oleh BUPR, kita lebih banyak anggaran saprodi bibit, pupuk dan obat-obatan, termasuk pengolahan, lebih banyak seperti itu. Jadi khusus untuk irigasinya dan jalan-jalan taninya di sana di tangani oleh, bukan jalan tani, irigasi termasuk dengan primer, sekunder terutama di Kalimantan Tengah adalah ditangani oleh PUPR.

Yang lain adalah masalah pupuk. Dalam 2-3 kali pertemuan termasuk yang terakhir dipimpin oleh langsung oleh Presiden. Saran yang kita mintakan adalah walaupun kita sudah masukkan bahwa pupuk ini dari 6 jenis atau 7 jenis yang ada tinggal dua, NPK dengan urea, dan NPK itu fosfat nya naik tiga kali lipat di luar dan ini menjadi masalah karena pupuk di luar negeri naik tiga kali lipat harganya, kita sudah majukan kepada Bapak Presiden bahwa untuk sementara pupuk jangan dinaikkan sampai dengan kita, dan hasil pembicaraan dengan Pupuk Indonesia Holding, kita sepakat untuk terus menahan kondisi itu. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, sehingga walaupun pupuk naik di luar, tetap kita berharap pupuk Indonesia kita bisa tahan sampai selesai tahun ini, dan ada dua industri pupuk lagi yang sementara terus dikembangkan selain pupuk yang di Aceh kemarin dan satu lagi pupuk mana itu, ada dua industri pupuk yang dipersiapkan untuk penambahan. Oleh karena itu, kita berharap dengan hasil rapat kerja kita disini, itu yang menjadi kesimpulan yang kami bawa dalam rapat terbatas dengan Presiden, dan kelihatannya Bapak Presiden memang menyetujui untuk secara maksimal, masih ada pertemuan yang direncanakan besok, dengan Menteri BUMN. Tetapi mudah-mudahan tidak tertunda, ini berkaitan untuk finalisasi kesimpulan kita terhadap pupuk yang ada

bahwa dari 70 jenis pupuk yang ada hanya 9 komoditas-komoditas, 70 jenis komoditas, ya tinggal Sembilan ya yang kita, dan itu hasil dari rapat kerja kita yang lalu yang kita teruskan dalam rapat siang ini.

Bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Tentu saja kita berharap lebih khusus menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, ini konsentrasi di Kementan akan terarah kepada itu, agar betul-betul ketersediaan cukup di setiap daerah. Tidak ada semua Eselon I, Eselon II ada di daerah Pak, ada daerah tanggung jawabnya, dan mudah-mudahan, karena dalam data kita, validasi data dan faktualisasi data, 11 komoditi khususnya, tersedia, termasuk kedelai, Bapak. Oleh karena itu, tinggal mungkin kita harus jaga sama-sama di lapangan menghadirkan kemampuan kita menata kelola, walaupun ini sebenarnya adalah tugas yang ada di luar kita, tapi kalau kita biarin, takut nanti bersoal lagi seperti kemarin, semua Dirjen ini ada daerahnya, Bapak, daerahnya. Pak Ali dimana? Sumatera, Pak, Jawa Tengah, Pak Anton? Di mana? Kalimantan, Pak? Semua ada, Pak. Sampai direktur kami ada, untuk menjaga semua komoditasnya dan setiap Jumat mereka melapor, untuk kemudian hari senin harus sudah ada penyikapan terhadap apa yang ada, misalnya terjadi di Banten kekurangan telur, maka Dirjen Peternakan akan langsung melakukan *cross check* untuk, 2, CB yang ada disana, adalah melakukan, percepatan atau memperlancar distribusi, yang kedua melakukan pendekatan produksi ke pasar yang ada. Kita tidak campuri pasar, karena urusan pasar tentu area kementerian lain. Tetapi kita untuk, berusaha sebenarnya ketersediaan cukup untuk itu.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pimpinan, setengah menit saja, terkait dengan telur. Jadi memang sekarang ini protein termurah itu *kan* konsumsi telur ayam dan daging ayam, iya *toh*, jadi harus ada kebijakan khusus di studi lagi, supaya GPS itu *enggak* terlalu banyak kita impor, manfaatkanlah GPS yang Bapak sudah rilis itu loh, ya. 1 dari 5 pengusaha dunia yang memproduksi GGPS, 1 *kan* Bapak yang rilis. *Nah*, ini harus dioptimalkan, Pak, ya, sesuai dengan harapan presiden juga, supaya itu menjadi produk-produk dalam negeri yang kita dorong.

Terima kasih, Pak Menteri.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silahkan, Pak Menteri, lanjutkan.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Kami akan jadikan catatan, Bapak, InsyaAllah seperti itu. Saya kira kurang lebih itu yang, ada satu hal yang mungkin juga sangat penting untuk saya jawab, adalah bagaimanakah agenda pertanian dalam G20, Bapak. Kita punya agenda tersendiri, pertemuan tingkat DG pada G20 itu tanggal 30-31 Maret kemarin sudah selesai, Bapak. Jadi itu tahap pertama untuk membicarakan isu yang harus dikembangkan, kemudian nah pertemuan kedua

tingkat deputi, Eselon I juga, 27 sampai 29 Juli 2022, kemudian pertemuan tingkat Menteri nanti tanggal 6-8 september, itu agenda kita yang berkaitan dengan G20, dan kita sepakat untuk mengusung tema keseimbangan produksi dan perdagangan untuk pemenuhan pangan bagi semua orang. Dari kemarin dari kurang lebih hampir semua 85% dari menteri yang ada ikut dalam *meeting-meeting* yang kita lakukan.

INTERUPSI F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, interupsi, Bu Ketua.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Keseimbangan produk ini menjadi bagian dari kesepakatan FAO dengan kita, Bapak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan, Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya saya *concern* dengan tema-tema pangan di G20 ini, karena saya ingin melihat Indonesia itu sebagai negara yang dominan, negara agraris. Saya ingin supaya produk-produk pangan yang unggul itu yang kita *endorse*, Pak Menteri, supaya dunia ini ga bermain dengan kita, itu Pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Saya bisa pahami tapi kita terbatas dengan kesepakatan tema, Bapak. Jadi kesepakatan tema secara global di G20 itu dimana dihadiri 54 Menteri Pertanian sedunia, itu antara lain adalah komitmen dan upaya bersama membangun sistem pangan berkelanjutan. Ini udah masuk, nanti kalau detailnya sudah bisa kita masuk dan masing-masing negara punya kepentingan. Kita kebetulan jadi presidensi G20 yang harus bisa mengakomodasi mereka. Sekarang ini yang paling sulit adalah negara-negara yang sangat-sangat patuh dengan Amerika, menyatakan kalau Rusia masuk mereka mundur, dan ini yang kita terus olah, bahwa di pangan tidak ada hal-hal yang berkait dengan masalah, permusuhan, atau perang, dan lain lain, karena pangan adalah kepentingan umat manusia. Itu yang kita bawa dalam G20, jadi yang paling *solid* di menghadapi G20 itu adalah yang berkait dengan pangan.

Yang kedua, tematik yang kita dorong adalah mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil, transparan untuk menghasilkan aset pangan bagi masyarakat dunia, tidak boleh ada *border*, penghalangnya. Yang ketiga, memberdayakan pemberdayaan bagi negara berkembang akan kemampuannya memproduksi pangan dan meningkatkan pendapatan yang ada. Jadi kalau yang berkait dengan ini semua negara G20 sepaham. Jadi tematik ini sudah menjadi tematik yang sudah dibicarakan mulai dari awal kita

menerima pendelegasian ini. Tetapi kemudian akan disatukan bersama pada G20, yang bersifat presidensial yang langsung oleh Bapak Presiden, presiden-presiden negara yang ada tetapi topik itu akan....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pak, Pak Menteri, sebentar. Saya akan...Gini, maksud saya memang kalau sudah untuk G20 pasti sudah ada tema-tema yang sudah kita tidak bisa keluar secara serta merta. Tapi, ide Pak Hermanto tadi menarik untuk bagaimana kita meyakinkan ke dunia luar bahwa kita punya produk-produk yang jadi unggulan. Bisa dengan menggunakan, apakah bisa misalnya contoh, ini ide aja, tadi yang idenya Pak Mindo misalnya, dagingnya adalah daging lokal, sapi Bali. Lalu kemudian makanannya adalah makanan khas Indonesia, yang bisa jadi diolah secara bisa dinikmati oleh semuanya, atau ada *gimmick-gimmick* di luar acara yang resmi untuk menampilkan inilah produk pertanian Indonesia. *Gitu*, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Sebagai tuan rumah tentu ada trik-trik kita yang untuk memaikan itu. Tapi untuk masuk dalam tematik, tentu ini seni aja untuk bisa memainkan karena kita tidak boleh keluar dari kesepakatan global yang itu. Misalnya hal yang sama juga terjadi bagi mereka semua, *kan* di dalam kesepakatan itu tidak boleh menggunakan media G20 untuk promosi apapun, apa saja yang berkait. Jadi kepentingan global yang menjadi utama, jadi isunya masuk seperti itu. Misalnya, ada serangan hama se-pasifik, bagaimana menghadapinya, ada pupuk yang bisa menyuburkan tanah menggunakan pestisida, itu menjadi topik-topik yang ada. Tapi, bahwa, di dalam, sebagai tuan rumah ada langkah kita untuk memperkenalkan kopi kita, memperkenalkan sawit kita, itu menjadi bagian-bagian tertentu diluar dari kesepakatan tematik yang seperti itu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bu Ketua, saya setuju dengan gagasan Pak Menteri ya, kita terbatas pada tema-tema yang sudah ditetapkan. Tapi ada ciri-ciri khas kita yang bersifat ke Indonesia an, menurut saya tuh perlu kita kembangkan tema itu, misalnya juga begini, kita kan menemukan ada ketidakadilan pangan ya di dunia ini. Ada semacam misalnya dominasi negara-negara kuat itu mengendalikan pangan, sehingga negara-negara yang kesulitan pangan itu mengalami hambatan, *barriers* untuk akses pangan untuk mengatasi pangan dalam negeri. *Nah* jadi, yang hal-hal prinsip keadilan ini yang perlu juga kita kedepankan, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Baik, Pak, itu masuk dalam tematik, kedua dan ketiga, Pak. Jadi memberdayakan bagi negara berkembang tapi istilahnya negara berkembang. Sebenarnya ini tujuannya memang cukup panjang kita diskusikan antara dominasi Amerika dan China yang terlalu kuat pada negara global hingga dibuatkan tematik. Dalam penjabarannya ini termasuk Pak Her, seperti apa kita

apa mem-*protect* diri kita supaya mereka tidak menguasai seluruhnya, karena kalau mereka punya kepentingan kita harus ikut, sementara kalau kita punya kepentingan mereka bisa *border*, katakana seperti itu. Contoh saja sapi dan kedelai, kalau kita *border* tidak boleh masuk, dia akan *border* semua kita punya *export* pertanian kita. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak, saya akan masukkan, saya tampung semuanya, dan InsyaAllah seperti apa, mungkin masih perlu

KETUA RAPAT:

Pimpinan, interupsi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kan kita sudah lihat selama ini bagaimana negara Cina mem-*border* kita, contoh, karena apa, ulahnya kita dulu, iya *toh*, tanya itu Kasdi itu tahu dia ulahnya apa kita terhadap negara-negara luar, maka dibalas. Contoh, kenapa buah-buahan pear dan lain lain, apel harus masuk melalui Jawa Timur karantinanya, kenapa tidak masuk Jakarta, kalau bicara produk hortikultura terbesar adalah Jawa Timur, itu *kan* yang..., tiba-tiba kita di intervensi Amerika bilang, " *gua mau ke Jakarta, lu mau apa,*" eh dibuka peluang untuk Amerika. Negara lain juga begitu, kita ini *kan ga* berdaya. Tadi Menteri mengatakan promosi kopi, CPO, kalau kopi dari zaman Belanda *udah* masuk Eropa, Pak melalui Singapur, CPO, Uni Eropa aja kelimpungan ngadepin kita, ya, *kan*. Kita juga tidak pernah diberitahukan apa yang dibicarakan oleh Kementerian Pertanian di G20, kita tidak pernah dapet info, dikasih tau juga *enggak*. Coba kita beli bibit kedelai atau jagung yang GMO, mereka bilang oh di Indonesia nggak bisa di Indonesia tidak boleh, Kementerian Pertanian tidak boleh, tidak memperbolehkan bibit yang mengandung GMO. Tetapi, yang di import itu *kan* GMO semua, apa bedanya. Jagungnya GMO, kedelai GMO, yang lain lain GMO, sama aja *kan*, kamu tidak boleh berkembang cukup saya saja berkembang, kamu perlu apa cari saya.

Inget *loh* Pak Menteri, ya, Shanghai sekarang lagi *lockdown nih*, *lockdown* total Shanghai. Orang tidak boleh keluar rumah. Berarti, berapa besar perdagangan dunia di Kota Shanghai itu *kan* termasuk nomor 2 apa nomor 3 terbesar di dunia, sekarang lagi *lockdown*, *nggak* boleh ada orang keluar rumah sama sekali sampai kontainer pun *numpuk* di pelabuhan, karena supirnya tidak boleh bekerja. *Lah* ini kita harus antisipasinya bagaimana, *kan* berkali-kali saya katakan pada Menteri dalam rapat ini *enggak* usah ...(*suara tidak jelas*) kopi ke Eropa lah, Eropa, orang Itali lebih jago kopinya lebih enak kok, dalam mengelola. Vietnam dalam meracik kopi lebih jago. Market terbesar adalah saat ini Cina. 15 tahun lalu orang Cina itu mungkin cuma *nggak* sampai 1% minum kopi, selebihnya minum teh. Tapi sekarang Starbuck terbesar, Starbuck terbesar di dunia, ada di Shanghai. Itu mungkin kalau bicara Senayan City, satu lantai, Starbuck dunia, terbesar di dunia, mereka bisa *nguasain*.

Kenapa *enggak* kita buka *market* yang dekat dululah, ke Cina, baru kita pikirkan negara-negara lain. Itu, Bu Ketua, ya, saya juga kecewa, Pak Menteri telah mengatakan kita tuan rumah G20, pertanian. Kita *enggak tau* apa isinya, juga tidak pernah diberitahu, langkah kita apa. Sementara G20 dari Kementerian Pertanian yang saya dapat info, cukup besar sekali biayanya. Mungkin sampai akhir nanti sampai selesai presiden-presiden datang mungkin diatas 150 miliar, ini kan besar sekali biayanya. Sama juga seperti kas dihitung biaya perjalanan dinas. Itu kan BPK udah manggil saya, 1,1 triliun satu tahun 2021, beda-beda tipis sama yang sebelah, 1,2 triliun. Dalam keadaan pandemi *loh*. Kemarin saya pertanyakan juga sama LHK, *kok bisa 1,2?* Dia jawab, KSDAE *pakenya* sampai 200 miliar dan saya cek ternyata *enggak*, dan saya minta ini adalah kejujuran. Saya tanyakan juga ke Kasdi kemarin, Sekjen, banyak mana pejabat-pejabat Kementan atau LHK, banyak Kementan. Berarti ya masih agak mendinganlah, dibanding LHK 1,2T. Itu saja.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M) :

Ketua, 1 menit *aja* untuk masukan Pak Menteri.

Tadi kita mendengarkan evaluasi *food estate*, Pak, ya. Saya sudah berkunjung juga ke Kalteng, Kata kunci di sana kalau kita lihat adalah air sebenarnya, Jadi saya kira langkah Pak Menteri sudah ketemu dengan Menteri PUPR ya Pak ya, saya kira cukup bagus Pak. Tinggal realisasinya di lapangan. Tinggal kita dorong PUPR ini betul-betul merealisasikan janjinya untuk penyediaan iri, apa namanya, irigasi air, Pak. Karena biar bagaimanapun bantuan kita dari Kementan untuk *food estate* ini kalau airnya *enggak* tersedia, ini juga akan menjadi masalah *gitu*.

Saya kira demikian, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, Bapak/Ibu, Pak Menteri, sudah? Kita masuk ke kesimpulan. Bapak.Ibu sudah *enggak* ada tanggapan ya. *Oh* iya karena ada Ibu Kiki sudah datang, kita ke kesimpulan. Silakan ditayangkan, belum. Kita tunggu sebentar, jangan di situ, jangan di sini nanti marah-marah. Kakak Ansi kalau mau buka puasa duluan *enggak papa*.

KETUA RAPAT:

Sebelum kita membacakan kesimpulan, saya persilakan dari Bulog maupun dari ID Food, dari Pupuk, akan apa yang disampaikan, karena Bapak-bapak diundang untuk *ngomong*, Pak. Kalau Bapak datang hanya duduk *aja kan*, Bapak juga *enggak* nyaman, kami juga *enggak* dapat info yang valid.

Silakan, mungkin dari Bulog dulu.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ketua, seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,
Pak Menteri Pertanian dan seluruh staf, dari ID Food dan Pupuk,

Pada kesempatan ini, Pak, perlu kami sampaikan, bahwa tadi beberapa hal yang telah d pertanyakan masalah beras di NTB dengan yang lain lainnya, Pak. Hasilnya Bulog sudah melakukan penyerapan, Pak, dan kemarin-kemarin perlu saya sampaikan bahwa kami juga tidak bisa melakukan penyerapan secara maksimal yang bulan lalu karena memang harga berasnya masih diatas HTP, Pak, harga gabahnya, Pak sehingga itu adalah satu keuntungan buat petani itu sendiri. *Nah*, sekarang ini memang beberapa, Pak, kecenderungannya sudah mulai menurun, Pak, Panennya sudah Panen Raya, jadi kita sudah mulai ada penyerapan khususnya di daerah NTB, Jawa Timur juga termasuk dari Ngawi yang kemarin ada masalah, Pak. Kemudian, sebagian dari Jawa Barat, masuk Lampung dan Sulawesi Selatan. Jadi, InsyaAllah bahwa untuk target kita, untuk masa panen ini, Pak, Kita bisa melakukan penyerapan kurang lebih prediksi kita 330-an ribu ton sehingga nanti stok yang ada pada setelah lebaran ini diperkirakan bisa melebihi dari 1 juta, Pak, yang ada di Bulog Pak. Untuk menyikapi masalah ketersediaan kita, berkaitan dengan kebutuhan menjelang puasa dan lebaran diluar permasalahan beras, kita juga melakukan upaya-upaya dengan melakukan kegiatan komersil, Pak. Jadi kita juga berkoordinasi dengan ID Food dengan jajaran yang lain termasuk kluster pangan yang lain sehingga kita akan melakukan kerjasama untuk kesiapan, ketersediaan, dan kejangkauan dari beberapa kebutuhan masyarakat.

Saya kira itu, Bapak, yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya ID Food, silakan.

**DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)/
HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Pak Menteri Pertanian, dan Para Sekjen dan Dirjen, Pak Dirut Bulog dan jajarannya, Pak Wadirut PHC dan jajarannya,

Dari kami menyampaikan, Pak, ada beberapa masukan tadi yang kami catat ada beberapa masukan terutama tadi tentang penyediaan protein hewani, bagaimana memanfaatkan potensi dari mitra-mitra peternak. Ini akan jadi catatan kami, kami juga cukup diskusi dengan Pak Johan, dan Pak Mindo untuk kedepan kami bisa bermitra dengan mitra-mitra peternak untuk meng-*obtain* hasil sapi mereka.

Kemudian kedua terkait persiapan Ramadan 2022, menyambung yang kami sampaikan sejak minggu lalu, kami sampai saat ini tetap mendistribusikan minyak goreng subsidi dengan HET 14.000, mungkin tadi sedikit meluruskan Bu Alien, memang dalam penyaluran HET minyak goreng, ada dua harga, per liter dan per kilo. Per liter 14000, per kilo 15.500. Konversinya demikian, Pak, seperti itu dan juga memang karena di penyaluran minyak goreng subsidi ini ada unsur subsidi, memang faktor kehati-hatian dan administrasi ini memang jadi PR supaya tetap GSG dan bisa kita *speed up*, dan target kami sampai Ramadan nanti bisa membantu pemerintah untuk menyalurkan kurang lebih 40 juta liter minyak goreng ke seluruh Indonesia.

Kemudian, di Jumat kemarin juga kami diminta oleh Kemendag untuk bersama-sama dengan Bulog juga untuk membantu pendistribusian gula ke Indonesia Timur. Saat ini bersama sama kita tahu yang kemarin mendapat penugasan gula kristal putih itu dari PTPN, jadi kami nanti menyalurkan gula itu yang berasal dari PTPN.

Demikian kami sampaikan, Pak Ketua dan Bapak/Ibu semua beberapa hal dalam persiapan Ramadan tahun ini,

Makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya dari Pupuk Indonesia.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (NUGROHO CHRISTIJANTO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri selaku jajaran dari Kementerian Pertanian,

Kami dari Pupuk Indonesia menyikapi apa yang tadi di sempat di pertanyakan di dalam forum rapat kerja kita pada hari ini. Yang pertama berkenaan dengan harga untuk Pupuk Komersial, Pak Ketua. Jadi menindaklanjuti rekomendasi yang sudah sampaikan oleh Komisi IV, kami dari Pupuk Indonesia berinisiatif beberapa waktu yang lalu untuk melaksanakan FGD dengan pihak Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan kemudian juga dengan pihak Kementan dan beberapa *stakeholders* lainnya untuk mendiskusikan masalah ini, dan kalau kita mengacu pada ketentuan yang ada dan pupuk itu dianggap sebagai bahan yang penting, kewenangan penetapan harga yang tadi oleh Pak Suhardi Duka disebut juga sebagai harga khusus, itu menjai domainnya di Kementerian Perdagangan karena sebenarnya dalam konteks Perpres Nomor 71 itu ada tiga harga, yaitu harga eceran tertinggi, harga acuan, maupun harga khusus. *Nah*, dari hasil FGD ini memang diskusinya masih memerlukan pendalaman yang lebih lanjut sehingga belum ada satu simpulan yang, apa yang akan digunakan sebagai rujukan ini nanti karena Kementerian Perdagangan pun ketika menetapkan harga khusus maupun harga cuan inipun juga perlu berdiskusi dengan seluruh *stakeholders* yang lainnya.

Oleh karena itu, sebagai bentuk respon dari Pupuk Indonesia, kami memang mencoba menetapkan harga di tingkat kami, Pak, di tingkat Pupuk Indonesia, yang kita membedakan antara kalau harga itu kita ekspor kemudian harga itu kita gunakan untuk kepentingan domestik tapi konsumennya korporasi, kemudian juga kalau itu kita gunakan retail maupun kalau harga itu kita lepas untuk program makmur. Permasalahan yang kita lihat adalah kita juga tidak bisa membuat perbedaan harga di masing-masing ini cukup besar karena potensi, saya ambil contoh kalau misalnya hari ini semua harga yang ditetapkan kecuali harga ekspor itu jauh lebih rendah daripada harga pasar internasional, dan untuk harga di tingkat retail seperti Urea kita menetapkan harga 9.300 kurang lebih, cuma kita tidak bisa menetapkan harga di level industri itu, disparitasnya cukup tinggi, karena dikhawatirkan ini nanti juga akan terjadi kebocoran dari level petani ke industri. Ini sementara yang sudah kami respon, berkenaan dengan apa himbauan untuk menetapkan harga di pupuk non subsidi.

Kemudian yang berikutnya, berkenaan dengan kedistributoran maupun kios komersial, kami sebenarnya sejak waktu itu di rekomendasikan sudah menindaklanjuti dengan menetapkan beberapa kriteria, nanti mungkin lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis, Pak Ketua, mengenai persyaratan itu dan *alhamdulillah* responnya juga cukup baik, untuk kios komersial khususnya. Karena kita membuka ini secara daring dan mereka bsa akses, dan kita akan melaksanakan, melakukan evaluasi atas persyaratan yang disampaikan melalui aplikasi-aplikasi.

Demikian respon dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Saya minta sama PI, selambat-lambatnya hari Rabu, persyaratan untuk menjadi agen pupuk komersial sudah ada ke sekretariat. Karena rencananya kami, Kamis tutup mata sidang, pulang ke Dapil masing-masing, jadi ingin menginformasikan apabila mau jadi agen pupuk *bla bla bla*, termasuk juga persyaratan atau deposit atau apa. Jadi jangan nanti kami pulang ke Dapil kami *ga tau* persyaratannya apa dan jadi bahan tertawaan.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Interupsi, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Sekedar mengingatkan buat Pak PIHC, Bapak dari ID Food ya? Dan mungkin Bulog, tapi kayaknya Bulog kasihan juga *sih, enggak* bisa berbuat banyak. Saya harap ini Pimpinan jangan lupa juga program-program apa yang sebenarnya bisa direalisasikan melalui Komisi IV ini, kita bicara program ya. Kayaknya duduk di sini kenapa juga mungkin jarang *ngomong*, karena kontribusi buat negara dan bangsa ini dari Bapak-bapak juga *enggak* ada kali *kan, Tuh, tuh*, apalagi ID Food *nih*. Saya lihat *kok* beberapa program Anda itu turun di lapangan, ya, cuma jangan timpang gitu karena kontribusi Anda sebagai juga sebagai ID Food sebagai BUMN di sini kami juga masih pertanyakan, fungsi Anda sebagai apa di sini.

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M):

Ketua, sedikit Ketua.

Pada Bulog....

KETUA RAPAT:

Ya, terakhir Pak Andi ya karena ini sudah pukul 14.30.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M):

Pada Bulog, Pak, Pak Buwas, kita ingin kedepannya, Pak, kalau ada keluhan harga gabah pada saat panen raya dibawah HPP di Dapilnya Anggota ini, Pak, mungkin ada penanggung jawab di kantor Divre-nya, Pak. Di Dapil saya kemarin, harganya dibawah 3.800 ya, Pak, ya. Kita ingin juga wibawa Anggota Dewan ini terselamatkan juga ini kalau ada keluhan kan ada langsung menindak lanjuti gitu, Pak Buwas, ya. Saya berharap seperti itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dari dialog, diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV, sebelum acara ini kita akhiri akan kami bacakan kesimpulan rapat kerja pada hari ini.

Silakan, Bu Ketua, jangan main handphone terus.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya, lihat jadwal buka puasa. Kan beda, Pak, jadwal buka puasa saya dengan Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak-bapak nanti yang hadir disini, Komisi IV mengadakan buka puasa bersama, InsyaAllah kalau ada waktu gabung dengan Pak Ketu aini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, saya bacakan draftnya.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Rp297.480.000.000,00 dari kegiatan *food estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
 1. Realokasi eksternal di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 untuk *combine harvester*.
 2. Realokasi internal sebesar Rp277.487.000.000,00.
 - b. Realokasi anggaran sebesar Rp124.475.000.000,00 dari kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L), bimbingan teknis, dan Toko Tani Indonesia pada Badan Ketahanan Pangan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - c. Realokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dari kegiatan pemberdayaan petani milenial pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi kegiatan pengembangan UPPO pada Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - d. Penyesuaian pagu anggaran:

1. Penambahan pagu lanjutan kegiatan surat berharga syariah negara pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp448.450.000,00; dan
 2. Penambahan pagu pinjaman bukan luar negeri sebesar Rp209.527.786.000,00; dan
 3. Perubahan prakiraan kelebihan pagu penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3.933.387.000,00 pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian.
- e. Realokasi anggaran sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk penguatan sistem informasi perkarantina sebagai big data dan pelaksanaan klinik ekspor di Badan Karantina Pertanian dengan rincian:
1. Realokasi internal Badan Karantina Pertanian Rp20.000.000.000,00;
 2. Realokasi eksternal Rp80.000.000.000,00.

Sehingga anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2022 berubah yang semula sebesar 400 triliun, aduh senang banget ya kalau 400 triliun, Pak Menteri, Rp14.451.749.428.000,00 menjadi sebesar Rp14.665.652.051.000,00 dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.593.813.463.000,00;
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp97.677.527.000,00;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp2.193.179.655.000,00;
4. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.099.990.027.000,00;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.167.410.034.000,00;
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.590.667.032.000,00
7. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian sebesar Rp2.980.669.852.000,00
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.293.5012.849.000,00
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp1.240.061.773.000,00
10. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp321.521.136.000,00
11. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp1.087.159.703.000,00

Para Anggota? Ini bacanya luar biasa, rasanya *pengen* minum loh.

KETUA RAPAT:

Ambil air minum dulu.

INTERUPSI F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bu Ketua, yang PSP. Saya konfirmasi dengan di halaman 5 presentasi ini, Bu, soal pupuk cair ini ada 150 miliar. Perasaan, kita tidak pernah membahas ini, Pimpinan *kok* ada *note* di sini 150 gitu termasuk di Dirjen PSP 2.9 soal pupuk cair.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya, di rapat yang lalu kita bahas juga kan seingat saya. Mungkin, Pak Dirjen, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN (IR. ALI JAMIL, M.P., PH.D.):

Izin, Pak Menteri, izin, Pak Ketua, Pak Johan. Pak, izin ini keputusan atau kesimpulan waktu di RDP kita minggu lalu, Pak, yang ada 150 ke pupuk organik cair atau pupuk hayati cair, itu soalnya untuk mendukung areal-areal pertanian, kita, Pak, khususnya di sawah yang produktivitasnya di bawah 5 ton karena target kita bagaimana supaya bisa nanti produktivitas kita 6 ton, Pak, kalau bisa. Ini *kan* posisi kita hari ini masih 5.2. *Nah*, berapa itu nanti berkembangannya di atas 5.2 harapan kita ada seperti itu, Pak. Jadi, itu kesimpulan di RDP kita minggu lalu.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Tentu lanjutannya, Bu Ketua, *kan* ini keputusan yang baru, kita juga bicara distribusi dong karena *kan* yang lain juga sama ada distribusi berarti ya stabil. *Nah*, ini juga *kan* harus kita sepakati juga modelnya bukan sekedar butuh angka di sini terus kemudian kita *enggak* tahu barangnya kemana. Itu, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya, baik, itu menjadi catatan ya saya pikir. Saya balik lagi di poin pertama, kita sepakati. Setuju, para Anggota? Pak Menteri?

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Tunggu-tunggu dulu.

Jadi *gini*, tadi kita lihat ya angka-angkanya sudah jelas Dirjen. Saya minta 2023 ya Inspektorat Jenderal sebesar 97 miliar, terbayang *enggak*, *enggak* sampai 1%? Jangan sampai nanti pemeriksanya ke daerah dijemput, *dibayarin* makan, *dibayarin* hotel *gitu* pulang dikasih oleh-oleh. Saya *enggak*

mau, saya maunya Inspektorat tegas. Yang namanya audit ke daerah, sewa mobil *kan* murah paling 700 ribu sehari, *enggak* perlu dijemputlah ya, Saudara Dirjen. Tapi saya inginkan minimal harus 1% lebih *nih*, jadi cuma Rp97.677.000.000,00, minim sekali. Ini *enggak* sepadanlah dengan apa yang diperiksakan. Kalau perlu perjalanan dinasnya dikurangi dari 1,1, tinggal 1 *aja*, 100 miliarnya *pindahin* ke Inspektorat Jenderal, itu saja.

Lanjut, Bu Ketua, nomor 2.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja Kementerian Pertanian tahun 2023 dan meminta agar rencana yang disusun fokus pada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan memperhatikan komoditas andalan, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023.

Para Anggota? Menteri?

KETUA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Sebentar, Bu Ketua. Tadi Pak Johan menanyakan POC ya, Pak Ali Jamil. Dia bilang harus ada peningkatan kalau tidak, tahun depan kita evaluasi ya.

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN (IR. ALI JAMIL, M.P., PH.D.):

Pak Menteri, jadi itu maksud, kita. Pak Ketua, jadi mudah-mudahan kalau itu kita tempatkan di area yang memang produktivitasnya rendah, kita harapkan ada peningkatan.

KETUA RAPAT:

Tapi, 2022 kita evaluasi ya. Kalau *enggak* 2023 kita *turunin* lagi ya.

DIRJEN PSP:

Siap, ini 2022 kita aplikasikan seperti itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Kita *enggak* mau, jangan sampai uang negara ini sia-sia, itu *aja*.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Interupsi, Pak Ketua.

Kalau begitu paling tidak dari sekian banyak itu, 5% dari demplot itu disampaikan ke kita di mana itu, sehingga kita bisa lihat nanti. 3 tahun terakhir berapa produktivitas di sana, setelah dimasukkan input baru, pupuk organik atau pupuk hayati terjadi peningkatan. Jadi dari 100 demplotnya ya 5 lah paling tidak, 5% ini perlu juga biar berbasis data.

KETUA RAPAT:

Oke, saya paham, Pak Mindo, Ketua. Jadi jangan 5%, kita *bikin aja* 10% nanti. Kita bikin komitmen *aja* kalau 5% nampaknya terlalu kecil, kalau perlu kita *bikin* 20%, kita cek sampel demplot wilayahnya dimana aja. Tolong kasih kami data yang lengkap supaya kami bisa ngecek langsung apa perkembangannya, apa yang ada kelebihanannya, itu saja.

Lanjut, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, kita sampai di mana ya?

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat serta memperbaiki mutu dan kualitas bantuan yang diberikan.

Para Anggota? Pak Menteri?

KETUA RAPAT:

(KETUK PALU 1 KALI)

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

Maaf-maaf, Bu ketua.

Saya sekedar memberi *noted* saja. Ini sudah beberapa kali poin 3 ini kayaknya udah hampir 3 tahun duduk di Komisi IV disuruh memperbaiki tapi *enggak* diperbaiki terus. Jadi jangan sampai cuma jadi pemanis kesimpulan saja, Bu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya menjawab.

Bukan pemanis, kita selalu mengingatkan maka tadi saya langsung tegur Dirjen PKH perihal Anggota semua komplain masalah kambing, sudah diingatkan saja begini apalagi kalau tidak diingatkan. Pemerintah setuju?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(KETUK PALU 1 KALI)

Poin 4, kenapa saya masukkan kesimpulan ini? Kita lihat nampaknya ini Kementerian Keuangan sudah sangat bingung mencari uang pajak darimana *ya kan*. Lada kita produksinya turun jauh *loh*. Coba, lada dikenakan pajak, pala, cengkeh. Cengkeh ini lebih besar impornya daripada lokalnya ini cengkeh. Kemudian bagaimana orang mau meningkatkan produksi kalau dikenakan PPh 11 sampai 12%? Ada lagi kita bicara swasembada gula, tebu dikenakan PPN pajak 11%. Kemudian kayu manis, kayu manis itu kan seberapa banyak sih produksi dalam negeri, kan nggak begitu banyak juga. Kenapa harus kena pajak? Kemudian vanili, vanili ini kan harga memang bagus, tetapi kan di Indonesia tidak ada satu pun yang nama perkebunan vanili kecuali milik rakyat, setengah hektar. Betul, Pak Mindo? Satu hektar itu sudah paling hebat, masa' mau dikenakan pajak? Kemudian padi, jagung. Kalau bicara jagung harganya 5 ribu, *it's okay*, kena pajak, tapi kalau pada saat anjlok harga jagung Rp2.800,00 dengan kadar air 30, ya mana untung lagi petaninya masih dikenakan pajak. Siapa yang menanggung? Ya, rakyat juga. *Nah*, apalagi *nih* kacang tanah, seberapa sih produksi kacang tanah kita di Indonesia? Mungkin 1 banding 4 impor dari India, padahal dulu *tuh* India ngambil bibit kacang tanahnya di Indonesia.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, yang paling besar itu kan kelinci.

KETUA RAPAT:

Dua kelinci, kalau 1 kelinci ... (suara tidak jelas), Ketua.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

95% impor dari India.

KETUA RAPAT:

Nah, masa' masih mau dikenakan pajak lagi. Kemudian ubi kayu disini dikenakan ubi pajak juga. Kalau saat ini mungkin, berapa Pak Hanan 1.200 ubi kayu? Ya, 1.500. Kalau pada saat harga 700 mana bisa istilahnya kena pajak, pajak *it's* pajak, kalau sudah ada Peraturan Menteri tetap dijalankan walaupun

harganya jatuh. Ini saya *enggak* habis pikir juga ini bikin-bikin seperti ini. *Gitu loh.*

INTERUPSI F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, kalau bahasanya seperti ini, saya bertanya soal nanti bagaimana pelaksanaannya ini. *Kan* ini bukan peraturannya Mentan, ini PMK.

KETUA RAPAT:

Betul. Jadi nanti dari sini, *kan* Pak Menteri ini menyampaikan kepada pemerintah melalui Ratas nanti sama Presiden. Ini *loh* terjadi keberatan, kenapa tadi dari awal saya ngomong tadi itu kacang tanah, ubi kayu, vanili, kayu manis, dan lain-lain ya karena ini tujuannya. Apa nanti kita bilang Pak Johan nyuruh Menteri Pertanian untuk..., itu *gimana?*

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan-jangan Pak Menteri tidak pernah hadir di rapat kabinet.

KETUA RAPAT:

Hadirlah yang lalu, masa *enggak* hadir.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Beliau tadi bilang saya suka diusir katanya.

KETUA RAPAT:

Hah?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Makanya perintah kita harus jelas, Pak

KETUA RAPAT:

Apa coba bunyinya?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ya, misalkan meminta Menteri Pertanian itu untuk meyakinkan apa namanya Menteri Keuangan misalnya agar tidak ada lagi pajak soal barang tertentu karena pajak hasil pertanian ini besar bebannya daripada nilainya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya juga *sih*. Coba Pak Ansi dibantu redaksinya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, mohon maaf ya. Dasarnya Menteri Keuangan itu *enggak* punya visi, bukan cuma soal di pertanian tapi perikanan kelautan, dan juga lingkungan hidup dan kehutanan. *Enggak*, Ini boleh *dong* kita *ngomong kayak* begini, dasarnya memang *kayak* begitu. Jadi tiga menteri kitapun walaupun bicara kancangpun begitu, otaknya tuh *enggak* bakal nyampe ke persoalan nelayan, petani, dan ternak ini. *Enggak* bakal *nyampe* dan tragisnya orang Indonesia kok mengeluh-elukan dia *kok* begitu. Saya setelah duduk di Komisi IV saya baru tahu *enggak* ada keberpihakannya ke sini padahal tadi Ibu Ketua *ngomong*, Ibu Pimpinan *ngomong* dalam situasi pandemipun aspek pertanian inilah yang menjadi penyangga. Akhirnya apa? Akhirnya yang *dipake* itu adalah melucuti peran negara sendiri, diserahkan kepada swasta dan korporasi. Itu yang terjadi, itu yang terjadi. Jadi, Pak Johan, saya yakin pasti Pak Menteri *fight*, saya yakin, pasti *fight*. Tapi seperti yang saya katakan Menteri Keuangan *enggak* punya visi ke arah sana, di tiga sektor ini setidaknya sektor Komisi IV *enggak* punya.

KETUA RAPAT:

Pak Ansi, bukannya *enggak* punya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Kasih tunjuk, saya, Pak. Kalau ada kebijakannya itu, ga begini, Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, BPDPKS diberikan kepada cukong itu *kan* ada berarti.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ya, itu salah satu contohnya, Pak. Jadi.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, biar Ansi melanjutkan kalimatnya saja.

KETUA RAPAT:

Ya, kalimatnya saja Ansi.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Jadi kan disitu kan rekomendasi....

KETUA RAPAT:

Bantu kata kalimatnya, Anda *kan* lihai, mantan wartawan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebagai dasar Menteri Pertanian berbicara di kabinet, *gitu loh*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

4. Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Para Anggota? Kakak Ansi masih berfikir?

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS):

Pimpinan, Pimpinan.

Itu kalau kita mendesak pemerintah c.q. Kemenkeu melalui Kementerian Pertanian, gitu. C.q-nya harus ada

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Setelah pemerintah c.q. Kemenkeu. Oke, para Anggota? Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, jangan *ngomong* di sini setuju nanti sampai sana *enggak* berani *ngomong* kata Pak Johan tadi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ngomong.

KETUA RAPAT:

Ngomonglah, kalau untuk rakyat apa *sih* yang *enggak* kita lakukan? *Gitu loh*.

Demikian rancangan kesimpulan rapat hari ini.

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS):

Interupsi, Pimpinan.

Terakhir, saya ingin bertanya karena Raker kemarin Pak Menteri menjanjikan agar Eselon I yang masih di PLT-*kan* segera dilantik. Kapan?

Makasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Saya *tuh* tunggu TPA dari presiden.

KETUA RAPAT:

Berarti sudah di sana, sudah tinggal *dikit* lagi *gitu loh*.

Sebelum kami menutup rapat kerja hari ini, kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup. Silakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Pimpinan Komisi IV DPR RI, Anggota Komisi IV DPR RI yang saya sangat hormati bersama jajaran Kementan,
Para pejabat dan teman-teman dari BUMN yang saya muliakan,

Terima kasih atas segala dinamika persidangan kita hari ini yang menurut saya, saya sangat mendapatkan energi dan tentu saja ini menjadi bahan perbaikan bagi teman-teman di Eselon I untuk menggodoknya lebih baik kedepan. Mohon terus pendampingan dan ya sekaligus terus mengkoreksi apa yang harus kami lakukan.

Pak Ketua dan para Pimpinan serta Anggota Komisi IV,

Kami harus tahu persis, Pak, bahwa situasi pangan tidak lagi baik-baik saja, karena secara global ini terjadi luar biasa dan pemicu inflasi negara itu sebenarnya lebih khusus. Saat ini Amerika sudah ber minus 7.2 bahkan di Turki sudah 61% dan Uni Eropa 6.8, Pak, Indonesia 2,3%. Harga-harga naik antara lain besok pemicunya karena BBM dan solar baik global maupun nasional tentu berkontraksi, Pak, dan kami harus berada pada upaya ketersediaan harus mampu dijamin dengan maksimal oleh Kementan ini. Tentu saja tidak semudah yang kita bisa bayangkan, Bapak, dan belajar dari minyak goreng walaupun tersedia banyak kalau tidak dikawal akhirnya jadi seperti itu. Saya yakin bahwa....

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H, M.H.):

Interupsi, Ketua.

Sedikit saja. Pak Menteri, kita semua memahami situasi kebatinan ini. Jadi saya harap juga Pak Menteri juga tidak menanam tebu di ujung bibir ya supaya kita sama-sama mencari solusi, mencari solusi bagaimana perbaikan kita semua ke depan terhadap sektor pertanian pangan dan di sini ada PHC ada ID Food dan Bulog. Jadi, saya harap kerja sama, tidak ego sektoral sekali lagi saya ingatkan, termasuk Eselon I.

Terima kasih, Pimpinan.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Saya kira seperti itu, Bu Kiky. Yang saya gambarkan ini kesulitan kita sama-sama, tidak mungkin Kementan mampu menghadapi ini sendiri, Bapak, tidak mungkin. Tentu saja ini membutuhkan kerja sama dengan kondisi yang seperti ini kata kebersamaan itu menjadi sangat-sangat penting memahami situasi yang ada. Kalau kami tidak jaga betul yang 11 komoditi ini, bisa bersoal, Bapak, dan itu ada keterbatasan di Kementan, karena kami cuma mengolah produksi dan ketersediaan tapi kita *enggak* boleh surut di sini, Pak. Kita harus tetap jalan karena di satu sisi memang kita berharap kontraksi ini harus bisa maksimal, kita bisa hadapi secara... Maaf-maaf kalau saya kemukakan ini karena tentu di forum inilah tempat yang paling tepat untuk menyampaikan kesulitan yang kita hadapi. Kalau kondisi harga makin naik kemudian kami panen raya dan kemudian harga turun ini akan menjadi dinamika tersendiri lagi bagi kami di..., maju kena mundur kena begitu, Pak. Belum lagi kalau kemudian kita tidak memblok secara langsung agar pupuk tidak naik walaupun kami sudah ada kesepakatan untuk tidak melakukan, harga pupuk di luar menarik sekali, Bapak. Oleh karena itu, bukan sedikit dari hasil akhir pembicaraan yang kita lakukan di Kementan bersama kementerian lain untuk melakukan kerja sama maksimal untuk menahan ini semua. Karena pada saat kita panen raya, langsung sesudah itu *nanam*, langsung saat itu membutuhkan pupuk dan di situ kesulitan-kesulitan ada di saat dinamika harga menjadi sesuatu hal yang sangat besar. Jadi harus dicari ditahan lajunya dari apa yang ada. Saya kira, saya minta maaf, Ketua, saya mohon dipahami kondisi ini dan kita perlu sama-sama lebih banyak ketemu di luar forum juga untuk berpikir sama-sama. Tetapi tidak semua daerah, Bapak, kami memetakan pada tiga kategori daerah, ada daerah merah, ada daerah kuning dan daerah hijau.

KETUA RAPAT:

Yang biru *ga* ada, Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Tidak ada.

KETUA RAPAT:

Harus ada dong.

MENTERI PERTANIAN (Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Jadi kalau pupuk *enggak* betul kalau ada birunya, hijau *aja*, Pak.

Aku terus lanjut atau *ga* ini? Kalau tidak aku berhenti *lah*. Izin, Pak Ketua, maksud saya *tuh* tidak semua, jadi perlu informasi yang ada di sana gulanya cukup tapi bawangnya jadi persoalan, ada di sana minyak gorengnya cukup tapi... dan sebentar lagi seperti itu, Bapak.

Saya kira itu yang kita hadapi sama-sama dan pasti DPR juga hadapi. Masalah pupuk *Insya Allah* sesuai apa yang ada, Bapak, kemampuan kita, kemampuan negara kita *kan* harga pupuk jadi naik. Fosfat di luar negeri naik tiga kali lipat ya, Pak. Oleh karena itu, pasti anggaran yang dipakai makin besar dengan subsidi yang dilakukan. Tetapi kesepakatan dengan Bapak Presiden tidak boleh mengurangi kuantitas yang ada karena kalau kita mau dengan harga yang ada sesuai dengan uang pasti turun.

Izin saya tambahkan sedikit, perjuangan kita untuk supaya tidak naikkan pajak dari pangan kita yang sampai 11 itu. Sebenarnya beras dalam proses tetapi baru itu langkah yang mampu kita lakukan. Jadi saya setuju *tuh* poin yang keempat supaya *basic* untuk terus berjuang untuk komoditi yang ada itu bisa kita lakukan seperti apa yang diharapkan oleh Komisi IV, Ketua tadi sampaikan.

Terima kasih atas apa yang ada, Bapak. Kami mohon untuk terus dibukakan pintu untuk kita bersama-sama. Kalau perjalanan *progress*-nya saya kira saya *enggak* pernah *rubah-rubah*, Bapak, dan yang ada harga kita, anggaran kita dari 24 jadi ke 16, dari 16 ke 15, ke 14, jadi bukan naik dan kami sudah 4 tahun WTP juga. Tapi, kalau tadi perintah pindahkan 100. Jangankan 100, Bapak, kalau perintah Ketua mau pindahkan 200, 300 Kementan siap melaksanakan.

Terima kasih atas segalanya, kurang lebih minta maaf selamat Ramadan, ridha Allah bersama kita.

Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan *nih* kalau rapat di MenkoEkuin ini, Eselon I jarang datang ini ya tapi karena juga Menko Ekuin-nya juga *ga* mimpin, biasanya yang mimpinya Deputi. Eselon I ini jarang datang ini Pak Irjen, tolong diingatkan ini ya maka kalau ada rapat di sana selalu ketinggalan topik karena biasa diwakili Eselon II, Eselon III dan ini saya dapat laporan langsung dari sana. Di sana pun yang biasa mimpin deputi. Ini loh, saya ingatkan. Kalau ada Rakortas atau apa di Kemenko Ekuin ya hadirilah supaya bisa mengambil keputusan. Ya, kan

selama ini contohnya tiba-tiba tidak perlu ada persetujuan, lewat, gitu aja dimana kewenangan kita, ya kan. Mau import selain jagung, misalnya ubi kayu, impor, impor aja, kan ga logika kalau impor ubi kayu untuk dikonsumsi sampai sekian ratus ribu ton. Seperti misalnya bagaimana menumbuhkan gairah petani untuk menanam kacang tanah, ya ga bisa, masuk, masuk gitu saja tanpa pajak, tanpa apa, tanpa koordinasi, tanpa melihat neraca pangan, diputuskan saja di sana, karena apa? Ya, Eselon I juga *ga* ada yang hadir di sana. Saya ingatkan itu. Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin ini ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabil'alamin*, rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.55 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002